



**Sensus
Ekonomi 2006**



ANALISIS SENSUS EKONOMI 2006

MENGENAI KETENAGAKERJAAN NUSA TENGGARA TIMUR



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**Sensus
Ekonomi 2006**



ANALISIS SENSUS EKONOMI 2006

MENGENAI KETENAGAKERJAAN NUSA TENGGARA TIMUR



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Analisis SE'06 Mengenai Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ISBN :
Katalog BPS :
Nomor Publikasi :
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah Halaman : xxxii + 49

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit Oleh :

Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

Tim Penulis

**Analisis SE'06 Mengenai Ketenagakerjaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Pengarah : Ir. Poltak Sutrisno Siahaan

Editor : Margiyan, B.Ba
Ir. Tutik Endari

Penulis : Ir. Tutik Endari
Ir. Eddy Luke Kitu
Ir. Charisal M. A. Manu, M.Si
Angela Regina Maria Wea, S.St MSi.
Yustinus Siga, A.St
Johanis Zogara, SE

Pengolah Data : Yustinus Siga, A.St

Perapian Naskah : Sabar A. Nainggolan, S.St
Sonia T. Amabi

KATA PENGANTAR

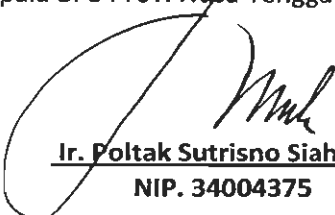
Sensus Ekonomi 2006 (SE06), merupakan sensus ekonomi ketiga setelah tahun 1986 dan 1996, yang merekam kegiatan ekonomi secara komprehensif diseluruh lapangan usaha kecuali Pertanian dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Informasi yang dihasilkan SE06 diperlukan bagi para pembuat kebijakan guna perencanaan pembangunan karena dapat menggambarkan potensi ekonomi di setiap wilayah baik secara sektoral maupun spasial.

Publikasi Analisis SE06 mengenai Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyajikan hasil pendataan SE06-SS secara sensus perusahaan perusahaan/usaha menengah besar dan secara sampel perusahaan/usaha mikro kecil yang dilakukan pada tahun 2007. Publikasi ini memaparkan analisis mengenai profil pekerja, kondisi ekonomi dan sosial pekerja, perkembangan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur, serta pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang.

Kupang, Desember 2008

Kepala BPS Prov. Nusa Tenggara Timur *ly*.



Ir. Poltak Sutrisno Siahaan
NIP. 34004375

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Penjelasan Teknis	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Tujuan.....	3
1.3.Sumber Data	4
1.4.Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. PROFIL PEKERJA	
2.1. Informasi Ketenagakerjaan dari SE06-SS.....	6
2.2. Profil Pekerja Perusahaan/Usaha	8
BAB III. KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL PEKERJA	
3.1. Produktivitas Pekerja.....	13
3.2. Tingkat Efisiensi Pekerja	16
3.3. Pendapatan Pekerja	17
3.4. Kondisi Sosial Rumah Tangga Pekerja	22
BAB IV. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DI NUSA TENGGARA TIMUR	
4.1. Konsep Ketenagakerjaan	25
4.2. Karakteristik Penduduk Bekerja	28
4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	30
4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	32
BAB V. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA	
5.1. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja.....	36
5.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja	39
5.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral	41
BAB VI. PENUTUP	
Penutup.....	46
Daftar Pustaka	50

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.	Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Kategori Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	6
2.2.	Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	7
2.3.	Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Pulau Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	8
2.4.	Banyaknya Tenaga Kerja menurut Skala Usaha dan Kategori Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	9
2.5.	Banyaknya Tenaga Kerja Dibayar dan Tidak Dibayar menurut Skala Usaha Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	10
3.1.	Pendapatan dan Produktivitas Tenaga kerja Usaha Mikro Kecil Hasil Sensus Ekonomi 2006 menurut Kategori Usaha	14
3.2.	Pendapatan dan Produktivitas Tenaga kerja Usaha Mikro Kecil Hasil Sensus Ekonomi 2006 menurut Kabupaten/Kota	16
3.3.	Jumlah Upah/Gaji yang Dibayarkan Perusahaan, Rata-rata Upah/Gaji yang Diterima Tenaga Kerja yang Dibayar pada UMK Hasil SE'06 menurut Kategori Usaha	18
3.4.	Jumlah Upah/Gaji yang Dibayarkan Perusahaan, Rata-rata Upah/Gaji yang Diterima Tenaga Kerja yang Dibayar pada UMK Hasil SE'06 menurut Kabupaten/Kota	19
3.5.	Upah/Gaji yang Dibayarkan Perusahaan, Rata-rata Upah/Gaji yang Diterima Tenaga Kerja yang Dibayar Hasil SE'06 menurut Skala Usaha.....	20
3.6.	Pendapatan Usaha, Upah/Gaji yang Dibayarkan Perusahaan dan Proporsi Upah terhadap Pendapatan, Hasil SE'06 menurut Skala Usaha	21
4.1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Agustus 2006 - 2008.	27
4.2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2006 - 2008	29
4.3.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2006 - 2008	30
4.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2006 – 2008.....	31
4.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2006 - 2008	33

4.6.	Setengah Pengangguran Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Agustus 2006 - 2008	34
5.1.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTT Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2007	36
5.2.	Kesempatan Kerja Berdasarkan Wilayah, Jenis Kelamin dan Sektor di NTT Tahun 2005 – 2007	38
5.3.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Kesempatan Kerja di NTT Tahun 2005 – 2007	40
5.4.	Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006 – 2007	42
5.5.	Perkembangan dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja Menurut Sektor, Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006 - 2007	43
5.6.	Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja Tiap Kenaikan 1 Persen PDRB Menurut Sektor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2007	43

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha dan Jenis Kelamin Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006	10
2.2a	Tingkat Pendidikan Pengusaha UMK di NTT.....	11
2.2b	Tingkat Pendidikan Pekerja Tetap dan Kontrak UMB di NTT	11
3.1.	Besarnya Pendapatan Perusahaan/Usaha Menengah dan Besar menurut Kategori Lapangan Usaha di NTT Tahun 2006.....	21
3.2.	Persentase Rumah Tangga Pekerja menurut Status Tempat Tinggal.....	22
3.3.	Persentase Rumah Tangga Pekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditatamkan	23
4.1.	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2006-2008	26
4.2.	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, dengan Kegiatan Utama Bekerja dan Penganggur Tahun 2006-2008.....	28
4.3.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka NTT Tahun 2006-2008	32
5.1.	Laju pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional, 2004 – 2007	37
5.2.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja NTT, 2004 - 2007..	41
5.3.	Perkembangan PDRB dan Tenaga Kerja Sektoral NTT, 2006 - 2007	45

PENJELASAN TEKNIS

1. Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel

Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS) merupakan kelanjutan kegiatan pendaftaran (*listing*) perusahaan/usaha, yang diselenggarakan pada tahun 2007. Kegiatan Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS) dilakukan di seluruh lapangan usaha kecuali pertanian dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yang berada dalam wilayah Indonesia. SE06-SS mendata secara rinci seluruh perusahaan/usaha berskala menengah dan besar (UMB) serta secara sampel perusahaan/usaha mikro dan kecil (UMK).

Informasi yang dikumpulkan melalui daftar SE06-UMK mencakup :

- a. Jumlah pekerja
- b. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- c. Struktur input
- d. Struktur output
- e. Permodalan
- f. Kendala dan prospek usaha
- g. Keterangan lain seperti bentuk badan hukum, penelitian dan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi

Informasi tersebut dikelompokkan dalam 3 jenis daftar berdasarkan karakteristik sektor/kategori lapangan usaha yaitu kelompok :

SE06-UMK Produksi

1. Pertambangan dan Penggalian (kategori C)
2. Industri Pengolahan (kategori D)
3. Listrik Non PLN (kategori E, KBLI: 4010)
4. Air Bersih Non PDAM (kategori E, KBLI: 4100)
5. Konstruksi (kategori F)

SE06-UMK Distribusi

1. Perdagangan (kategori G)
2. Penyediaan makan/minum, Bar dan Jasa Boga (kategori H)
3. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (kategori I)

SE06-UMK Jasa-Jasa

1. Lembaga Keuangan (kategori J)
2. Real estat, Persewaan dan Jasa Perusahaan (kategori K)
3. Jasa Pendidikan (kategori M)
4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (kategori N)
5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya (kategori O)
6. Jasa yang melayani rumah tangga (kategori P)

Selanjutnya informasi UMK yang dikumpulkan ini dibedakan menjadi 2 jenis data yaitu:

- Data KOR adalah jenis data yang ragamnya sama untuk ketiga jenis kuesioner tsb.
- Data MODUL adalah jenis data yang ragamnya berbeda antara ketiga jenis kuesioner tsb.

2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang diuraikan hanya dibatasi pada istilah yang digunakan dalam analisis ini.

2.1. Umum

Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab/menanggung resiko.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2005 menggunakan kode angka 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi, disamping itu dicantumkan pula kode alfabet yang disebut kategori.

Kategori merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit dengan kode alphabet. Dalam KBLI seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan Q, dan X sebagai kegiatan yang belum jelas batasannya.

Skala Usaha dalam SE06, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan perusahaan/usaha dalam empat kategori skala usaha, yaitu : mikro, kecil, menengah, dan besar. Kecuali untuk perusahaan/usaha industri pengolahan, kriteria yang digunakan adalah berdasarkan omset yang dimiliki perusahaan dan kriteria lain yang selama ini digunakan oleh BPS. Pengelompokan berdasarkan omset per tahun adalah sebagai berikut :

- usaha mikro : < Rp. 50 juta
- usaha kecil : Rp. 50 juta - Rp. 1 milyar
- usaha menengah : Rp. 1 milyar – Rp. 3 milyar
- usaha besar : > Rp. 3 milyar

Perusahaan/usaha industri pengolahan menggunakan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan/usaha. Pengelompokkannya sebagai berikut :

- usaha mikro : < 5 orang
- usaha kecil : 5 – 19 orang
- usaha menengah : 20 – 99 orang
- usaha besar : > 100 orang

Penjelasan : perusahaan/usaha yang berstatus cabang/perwakilan/unit pembantu yang hanya melayani perusahaan pusat/induknya tidak dapat ditentukan klasifikasi skala usahanya, karena tidak mempunyai informasi omset.

Kegiatan utama : Kegiatan yang mempunyai nilai pendapatan paling besar diantara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha.

Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/usaha.

Barang Jasa Utama : Barang/jasa yang utama dihasilkan/dijual oleh perusahaan atau yang memberikan nilai terbesar dari berbagai jenis barang/jasa yang diproduksi/dijual.

Biaya Umum: Biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan operasional kantor/administratif dan jenis pengeluarannya hampir sama, misal: biaya telepon, listrik, transportasi, bahan bakar, perbaikan ringan, sewa kantor, dan sejenisnya. Tidak termasuk pengeluaran untuk upah/gaji karyawan, bahan baku dan sebagainya.

Biaya Promosi dan iklan : Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk/dagangan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Biaya promosi/iklan yang tercakup disini adalah promosi/iklan yang dilakukan oleh pihak lain, sedangkan promosi/iklan yang dikerjakan oleh perusahaan sendiri dimasukkan ke dalam pajak tak langsung.

2.2. SE06-UMK

Badan Usaha : Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan usaha yang disebut Badan Hukum adalah suatu usaha yang modalnya dipisah, seperti: PT (Persero), PT BHMN, Koperasi dan Yayasan

Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum adalah suatu usaha yang modalnya tidak dipisah, seperti: CV, Fa (Firma), dan Perorangan.

Bentuk badan hukum/badan usaha antara lain:

1. **Perusahaan Umum Negara (Perum)**: perusahaan milik negara yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*). Usaha yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.

PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

Perseroan Terbatas (PT): perusahaan berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan, tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.

2. **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
3. **Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV):** Bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
4. **Firma:** Persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.
5. **Badan Hukum Milik Negara (BHMN):** Bentuk badan usaha untuk perguruan tinggi milik pemerintah.
6. **Yayasan:** merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.
7. **Perwakilan Perusahaan Asing:** Bentuk badan hukum suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahnya diluar wilayah Indonesia. Contoh : *Ltd. (Limited), Corp. (Corporation)*.
8. **Ijin/Ijin khusus dari instansi terkait:** Perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah pada perusahaan/usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Ijin khusus sifat lebih spesifik, misal: ijin dari instansi Dinas Pariwisata daerah untuk pemberian status sebagai Hotel Bintang,
9. **Perorangan:** Suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha.

10. Lainnya: badan usaha/perijinan yang tidak termasuk di atas, dan tuliskan secara lengkap. Termasuk dalam kelompok ini usaha perorangan.

Jaringan Perusahaan/Usaha ditujukan untuk melihat apakah perusahaan tersebut berdiri sendiri (tunggal) atau memiliki hubungan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain.

Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.

Contoh :

PT. Caltex Pasific Indonesia, meskipun memiliki unit operasional di tempat lain, akan tetapi unit operasional tersebut bukan merupakan cabang dari PT. Caltex.

Kantor Pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/Unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu.

Contoh :

1. PT. Sarinah Jaya (Dept. Store) berkantor pusat di Jl. MH Thamrin memiliki kantor cabang di Jl. Juanda dan memiliki unit pemasaran (Dept. Store) di TMII.
2. PT. Telekomindo Primabhakti (Jasa sambungan telepon bergerak GSM dan pembangunan sarana komunikasi dan paging) berkantor pusat di Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat memiliki cabang di Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.

Kantor Induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja terhadap kegiatan di tempat lain yang secara administratif melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh perusahaan di daerah lain, tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan induk.

Pabrik adalah tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan/proses produksi, yaitu merubah bahan dasar/baku menjadi barang jadi atau setengah jadi (dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih bernilai).

Pengertian pabrik tidak harus merupakan bangunan besar yang memiliki mesin-mesin dan ada cerobong asapnya, termasuk juga suatu tempat proses pembuatan barang seperti tempat pembuatan mebel, tempat pembuatan tahu, tempat pembuatan gerabah (bahan-bahan dari tanah liat).

Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Contoh : Galeria (Pasar Baru) adalah cabang dari PT. Matahari Putra Prima

Penjelasan : Istilah cabang dalam SE06 ini mengandung pengertian umum, artinya penggunaan istilah ini berbeda antara jenis kegiatan ekonomi/usaha, istilah ini digunakan dengan tingkatan lebih rinci. Misalnya cabang utama, cabang, dan cabang pembantu. Jenis kegiatan lain mungkin menggunakan istilah yang berbeda, namun tetap dikategorikan cabang, sejauh memenuhi definisi kantor cabang.

Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.

Contoh : CV. SDN (Sampoerna Distribusi Nusantara) merupakan distributor dari produk PT HM. Sampoerna berkantor pusat di Surabaya (kode 2; kantor pusat/induk). CV. SDN ini memiliki kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Kantor Perwakilan CV.SDN di Semarang, Jawa Tengah (kode 5; perwakilan).

Unit Pembantu adalah unit kegiatan ekonomi yang dalam memproduksi barang/jasa terutama untuk keperluan unit kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya, baik kantor pusat, perwakilan, ataupun cabang. Unit pembantu pada umumnya tidak berwenang.

Penjelasan : untuk perusahaan/usaha yang berstatus cabang/perwakilan/unit pembantu yang hanya melayani perusahaan pusat/induknya tidak ditanyakan aset perusahaan/usaha yang dimiliki pada akhir tahun 2005 dan nilai produksi/omset/pendapatan selama tahun 2005.

Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial : Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan).

Pekerja : Orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Pekerja tetap : pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.

Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/ gaji secara tidak tetap, tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.

Pekerja Harian Lepas : Pekerja dibayar yang tidak terkait secara tetap dengan perusahaan/usaha, biasanya mereka bekerja selama ada pekerjaan/proyek dan upah yang diterima sesuai dengan jumlah hari kerjanya.

Contoh : Tukang kayu,tukang batu, kenek/pembantu tukang.

Banyaknya Pekerja: Banyaknya pekerja tetap yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.

Jam kerja: Jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan perusahaan (tidak termasuk istirahat resmi), yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup. Jam kerja sehari maksimum 24 jam dan minimum 1 jam.

Rata-rata jam kerja per hari : Jumlah jam kerja kegiatan selama sebulan yang lalu dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.

Pekerja/karyawan Dibayar: Pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja/karyawan Tidak Dibayar: Pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasa aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

Pekerja Produksi: Pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja Lainnya: Pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti: manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga mala, sopir perusahaan dll.

Upah/gaji: Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

Upah lembur: Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

Hadiah: Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.

Bonus: Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

Tunjangan: Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.

Khusus untuk kelompok PRODUKSI

Bahan baku dan penolong: Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha, berupa bahan baku dan penolong menurut satuan standar, banyaknya dan nilainya dalam rupiah.

Pembelian air baku : Biaya untuk membeli air baku yang akan diolah menjadi air minum untuk disalurkan/dijual kepada pelanggan.

Bahan kimia untuk proses penjernihan : Pemakaian bahan kimia yang dicampurkan dengan air baku (proses penjernihan air) untuk memperoleh air bersih.

Bahan bangunan dari pekerjaan yang dilaksanakan: Pengeluaran bahan bangunan yang telah digunakan, tidak termasuk stok/persediaan.

Khusus untuk kelompok DISTRIBUSI

Pembelian barang dagangan yang terjual:

1. Termasuk pembelian barang dagangan yang dititipkan kepada pihak lain (tidak dijual sendiri).
2. Barang dagangan yang sudah dibeli, tetapi belum terjual tidak dimasukkan sebagai pembelian barang dagangan yang terjual. Barang dagangan yang dijual bisa berasal dari pembelian sebulan yang lalu atau stok awal sebulan yang lalu.

Biaya penyelenggaraan pertunjukan: Meliputi biaya sewa tempat/gedung, perlengkapan, pencetakan tiket pertunjukkan, konsumsi dan sebagainya.

Biaya bunga yang dibayarkan kepada anggota: Beban bunga atas simpanan anggota berupa tabungan atau simpanan berjangka, bunga atas pinjaman kepada pihak ketiga, beban administrasi pinjaman dan beban provisi/komisi yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana. Isikan biaya untuk setahun dan sebulan yang lalu.

Pembelian/perolehan tanah/bangunan yang terjual selama tahun 2006: Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pembelian/perolehan tanah/bangunan yang terjual selama tahun 2006.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, terdiri dari dua:

- **Biaya sewa tanah untuk usaha:** Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu atas penggunaan tanah milik pihak lain.

- **Bunga atas pinjaman modal:** Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: Bunga yang dibayarkan ke Bank,

Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan: Nilai borongan atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak lain.

Pajak tak langsung: Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui “produsen” terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

Biaya reklamasi (Penutupan dan Revegetasi) : Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk menutup kembali area yang rusak/ berlubang akibat usaha penambangan/penggalian, termasuk biaya menyuburkan kembali tanah dan menanami dengan tumbuhan (revegetasi).

Biaya kendali erosi : Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasi di tepi sungai/tepi laut akibat usaha penambangan/penggalian.

Biaya untuk pengawasan meteran yang ada dipelanggan dan biaya pencetakan rekening tagihan. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya transport untuk pengawasan meteran ke setiap pelanggan.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh pihak lain, sedangkan apabila promosi/iklan dikerjakan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan) dimasukkan ke dalam jasa lainnya.

Biaya royalti: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu atas penggunaan merek dagang/hak patent/resep masakan pihak lain.

Harta / Aset : Kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha, harta pada UMK dianggap sama dengan modal.

Harta lancar: Uang kas dan harta lain yang habis dalam satu kali perputaran proses produksi (yang diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya) dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari satu tahun.

Harta/modal tetap dibagi menjadi dua yaitu :

1). **Harta/aset tetap Berwujud (tangible fixed assets):** Kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit), yang dalam penggunaannya dalam jangka panjang atau tidak habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan.

Harta/Aset Tetap berwujud dirinci menurut jenisnya:

a). tanah, b). gedung, c). mesin dan perlengkapan, d). kendaraan, dan e). modal tetap lainnya..

2). **Harta/aset tetap tak berwujud (intangible fixed assets)** adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan perusahaan.

Contoh : hak cipta, merek dagang, biaya pendirian (organization cost), lisensi, goodwill dan sebagainya.

Kewajiban/hutang dalam istilah ekonomi dapat diartikan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara (pada saatnya harus dibayar kembali).

Penggolongan kewajiban/hutang dibagi menjadi 2:

1). **Kewajiban/hutang lancar jangka pendek (short term-debt)** yaitu kewajiban/hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, terdiri dari :

a. **Kredit rekening koran**, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafon tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus

melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.

- b. Kredit dari penjual**, yaitu kredit perniagaan yang terjadi apabila penjualan dilakukan secara kredit (perusahaan menerima pembayaran dari barang yang terjual beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan).
- c. Kredit dari pembeli**, yaitu kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada leveransir dari bahan mentah atau barang-barang lainnya.
- d. Kredit wesel**, yaitu 'surat pengakuan hutang' yang dikeluarkan perusahaan berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, dan setelah ditandatangani dapat dijual atau diuangkan kepada bank.

2).Kewajiban/hutang Tidak lancar yaitu kewajiban/hutang yang jangka waktunya 1 tahun dan atau lebih, terdiri dari :

- a. Kewajiban/hutang jangka menengah (Intermediate-term debt)**, yaitu kewajiban/hutang yang jangka waktunya antara 1 s.d 9 tahun. Contoh kredit investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).
- b.Kewajiban/hutang jangka panjang (long-term debt)**, yaitu kewajiban/hutang yang jangka waktunya 10 tahun atau lebih. Contoh: hutang obligasi dan hipotik

Modal (equity): Hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditujukan di pos modal, surplus dan laba ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Modal terdiri dari :

- a. Modal awal**, terdiri dari modal dari saham-saham yang dimiliki oleh satu atau lebih pemilik. Jika modal perusahaan bukan terdiri dari saham (bukan PT) maka modal awal adalah modal dari pemilik itu sendiri.

Modal awal yang dimaksudkan disini adalah modal pada awal tahun periode, yang berarti merupakan akumulasi modal awal tahun sebelumnya ditambah laba yang ditahan pada tahun sebelumnya.

b. **Penambahan modal**, terdiri dari laba yang ditahan (*retained earning*), saham-saham baru dan lain-lain selama tahun yang bersangkutan.

JUMLAH HARTA / ASET = JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL

Status penanaman modal adalah permodalan yang dikuasai perusahaan pada waktu pendirian, atau pada waktu statusnya ditentukan oleh BPM. Untuk mengetahui status permodalan dari suatu perusahaan/ usaha dilihat dari keputusan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku.

Menurut Undang-undang PMDN, yang disebut **Perusahaan Nasional** adalah *perusahaan yang sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51%) dari modal yang ditanam di dalamnya, dimiliki oleh negara dan / atau swasta nasional.*

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku. Kebijakan umum mengenai PMA adalah mengandung maksud menarik investor-investor asing yang diarahkan untuk berperan menunjang akselerasi pembangunan nasional. PMA dibuka dalam upaya mengisi kekurangan permodalan dan kemampuan nasional. Peranan modal asing dapat terjadi sebagai berikut :

- a. Seluruhnya Modal Asing, artinya tidak bercampur dengan Modal Nasional.
- b. Sebagian Modal Asing dan sebagian lagi Modal Nasional.

Bentuk Perusahaan Modal Asing

Perusahaan penanaman modal asing ini harus berbentuk Badan Hukum Indonesia (PT), sehingga pihak asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tidak bisa sebagai perseorangan, berarti berlaku ketentuan yang mengatur PT (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

3.Non Fasilitas

Suatu perusahaan yang status permodalannya tidak mendapat fasilitas dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau BKPM dan atau modal diluar fasilitas BKP dan BKPM.

Catatan :

Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari :

- a. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang fasilitas permodalannya kepada BPM atau kepada presiden.
- b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan tentang fasilitas permodalannya tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BPM (masih dalam proses).

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja yang berlangsung selama pekerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan usaha secara umum.

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan ketrampilan/teknik produksi: Jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.

Bimbingan/penyuluhan pemasaran: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

2.3. SE06-UMB

Pendataan SE06 UMB tahun 2007 dilakukan melalui 3 (tiga) kelompok sasaran, yaitu kelompok perusahaan/usaha yang dicacah secara rutin oleh BPS (UMB Berkala), kelompok perusahaan/usaha yang spesifik dan memerlukan pendekatan khusus (UMB Khusus), dan kelompok perusahaan/usaha yang tidak digolongkan rutin maupun khusus, yang digolongkan sebagai kegiatan perusahaan/usaha baru dilakukan secara terpadu (UMB Baru).

Secara keseluruhan kegiatan usaha yang dicakup meliputi perusahaan/usaha sbb:

1. Listrik Non PLN
2. Perdagangan Besar dan Eceran
3. Restoran/Rumah makan, Bar, dan Jasa Boga.
4. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
5. Real estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
6. Jasa Pendidikan
7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan (tidak termasuk organisasi buruh, keagamaan, dan organisasi politik).

i. Kegiatan Ketenagalistrikan: kegiatan yang melakukan pembangkitan tenaga listrik, pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Termasuk di dalamnya kegiatan penunjang tenaga listrik, seperti konsultan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, serta pengembangan teknologi penunjang penyediaan tenaga listrik yang tidak dapat dipisahkan secara administrasi dari usaha listrik.

Perusahaan listrik : perusahaan yang melakukan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, pengoperasian jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik kepada rumah tangga, lembaga sosial, bisnis, instansi dan konsumen lainnya untuk tujuan komersial. Perusahaan listrik yang dicakup kegiatan ini adalah perusahaan listrik yang dikelola oleh swasta (Non PLN).

Jenis usaha ketenagalistrikan yang diusahakan oleh perusahaan meliputi :

1. Pembangkitan tenaga listrik (40101)

Usaha membangkitkan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi tenaga air, batubara, gas, tenaga surya, bahan bakar minyak, panas bumi, nuklir, dan sebagainya.

2. Transmisi tenaga listrik (40102)

Usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan bertegangan tinggi dan atau bertegangan ekstra tinggi termasuk gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari pihak lain.

3. Distribusi tenaga listrik (40103)

Usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah sampai kepada konsumen atau pelanggan termasuk gardu-gardu distribusinya baik yang berasal dari produksi sendiri maupun dari pihak lain.

4. Jasa penunjang kelistrikan (40104)

Mencakup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan.

II. Perusahaan/usaha perdagangan: perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi penjualan mobil dan sepeda motor, serta penjualan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU (50), perdagangan besar dalam negeri (grosir) (51), perdagangan eceran (52), perdagangan ekspor (53), dan perdagangan impor (54).

Perdagangan besar (wholesaler): perdagangan barang baru maupun bekas, pada umumnya dalam partai besar kepada pedagang eceran, perusahaan industri, kantor, rumah sakit, rumah makan dan akomodasi. Perdagangan besar tidak menjual barang dagangan kepada konsumen rumahtangga. Termasuk disini adalah perusahaan perdagangan ekspor dan impor.

Perdagangan eceran (retailer) adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang pada umumnya dalam partai kecil oleh toko, toko serba ada (toserba), kios, tempat penjualan melalui pesanan, penjaja dan penjual keliling, perusahaan konsumen, tempat pelelangan, dan sebagainya kepada masyarakat umum untuk penggunaan atau konsumsi perorangan atau rumahtangga. Meliputi pula swalayan dan departemen store.

Lokasi Usaha diambil dari Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta:

- i. **Mall/super mall/plaza:** sarana/tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruang yang menyatu.
 - ii. **Pusat perbelanjaan:** tempat jual beli umum yang terdiri dari pertokoan, pasar, dan pusat pertokoan yang mengelompok dalam satu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah atau kawasan perdagangan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, yang pelayanannya dilakukan secara modern dan menggunakan teknologi maju.
 - iii. **Pertokoan** adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
 - iv. **Perkantoran** adalah sarana/tempat usaha yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, instansi untuk melakukan aktivitas bisnis/pemerintahan. Perkantoran dapat berupa gedung tersendiri atau pun terletak dalam bangunan/ ruang yang menyatu.
 - v. **Perumahan/pemukiman** adalah sarana/tempat yang diperuntukkan bagi tempat tinggal.
- III. Restoran/Rumah Makan:** usaha mengolah menyajikan, menghidangkan dan menjual makanan/minuman bagi umum di tempat usaha dengan bangunan di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian maupun tidak dan telah mendapatkan ijin dan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. Restoran yang merupakan salah satu fasilitas dari hotel (menjadi satu kesatuan dengan hotel) tidak dicacah pada kegiatan ini.
- Warung Makan:** usaha mengolah menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat yang tetap (tidak berpindah-pindah), baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapat ijin dan surat dari instansi yang membinanya.

Bar: usaha dengan kegiatan utama menghadirkan minuman keras dan atau minuman beralkohol serta makanan kecil (*snack*) lainnya untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya, dan dapat dilengkapi dengan karaoke.

Jasa boga: usaha penjualan makanan jadi (siap dikonsumsi), yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat pesta, seminar, rapat dan sejenisnya beserta pramusaji yang akan melayani tamu-tamu. Termasuk dalam kelompok ini jasa boga yang melayani konsumen angkutan udara, kereta api, dan tempat pengeboran minyak.

IV. Usaha angkutan: suatu kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor baik melalui darat, air maupun udara dengan mendapatkan balas jasa.

Perusahaan angkutan: usaha angkutan yang diselenggarakan/dikelola secara komersial, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri meliputi biaya, output/omzet, pekerja dan balas jasa pekerja yang digunakan dalam proses usaha.

Perusahaan angkutan jalan yang dicakup kuesioner SE06-UMB-I1 meliputi:

- Angkutan Antar Kota Antar Propinsi [60211]
- Angkutan Perbatasan [60212]
- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi [60213]
- Angkutan Kota [60214]
- Angkutan Pedesaan [60215]
- Angkutan Khusus [60216]
- Angkutan Lintas Batas Negara [60217]
- Angkutan Taksi [60221]
- Angkutan Sewa [60222]
- Angkutan Pariwisata [60223]
- Angkutan bermotor untuk barang khusus [60232]

Perusahaan angkutan laut yang dicakup kuesioner SE06-UMB I1 meliputi:

- Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Penumpang [KBLI: 61111]
- Angkutan Laut Domestik Umum Tramper Untuk Penumpang [KBLI: 61112]
- Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Barang [KBLI: 61113]
- Angkutan Laut Domestik Umum Tramper Untuk Barang [KBLI: 61114]
- Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Wisata [KBLI: 61115]
- Angkutan Laut Domestik Khusus UntukBarang [KBLI: 61116]
- Angkutan Laut Domestik Perintis [KBLI: 61117]
- Angkutan Laut Domestik Pelayaran Rakyat [KBLI: 61118]
- Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Penumpang [KBLI: 61121]
- Angkutan Laut Internasional Umum Tramper Untuk Penumpang [KBLI: 61122]
- Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Barang [KBLI: 61123]
- Angkutan Laut Internasional Umum Tramper Untuk Barang [61124]
- Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Wisata [61125]
- Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Barang [61126]
- Angkutan Laut Internasional Pelayaran Rakyat [61127]

Pelayaran rakyat yaitu kegiatan pelayaran untuk umum yang melakukan kegiatan angkutan laut yang menggunakan kapal atau perahu rakyat yang terdiri dari kapal layar, perahu-perahu layar, motor phinisi atau kapal motor dengan ukuran di bawah 100 m³ atau bobot kapal maksimum 295 GT.

Muatan Dalam Negeri (Antar Pulau) adalah muatan berupa barang atau penumpang yang diangkut dari suatu pelabuhan asal ke pelabuhan lain yang merupakan tujuan, di mana kedua pelabuhan (asal maupun tujuan) berada dalam wilayah pabean Indonesia.

Muatan Luar Negeri adalah muatan berupa barang atau penumpang yang diangkut dari suatu negara lain ke dalam wilayah pabean Indonesia (termasuk muatan barang dari kawasan berikat) dan atau muatan berupa barang atau penumpang yang diangkut dari dalam wilayah pabean Indonesia ke negara lain.

Perusahaan Jasa Penunjang Angkutan meliputi jasa penunjang angkutan darat (Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat), air (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan udara (Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) dan jasa penunjang angkutan lainnya seperti jasa pengurusan transportasi, jasa pelayanan bongkar muat barang, pergudangan, jasa *cold storage*, dan jasa perparkiran.

Pergudangan mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Jasa *cold storage* mencakup usaha jasa penyimpanan barang-barang yang memerlukan pendinginan/pengawetan dalam jangka waktu tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.

Sarana komunikasi yang dioperasikan :

- i. ***Very Small Apertur Terminal (VSAT)*** adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi, dan file.
- ii. ***Radio Trunking*** adalah sistem komunikasi radio dua arah yang dapat memanggil yang bersifat mobile biasanya digunakan untuk pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi.

Jenis sambungan komunikasi :

- a. Dengan Kabel (*wireline*) yang diselenggarakan PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
- b. Dengan tanpa kabel/nirkabel (*wireless*) yang diselenggarakan PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT. Bakrie Telecom, Tbk

Jasa Telekomunikasi lainnya adalah perusahaan jasa penjualan pulsa, baik berupa voucher maupun elektrik, termasuk jasa penjualan kartu perdana telepon seluler.

Biro perjalanan wisata/cabang biro perjalanan wisata adalah usaha yang merencanakan dan mengemas perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata dengan lingkup kegiatan meliputi : penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyediaan dan atau pelayanan angkutan wisata, pemesanan jasa akomodasi, restoran dan sarana wisata

lainnya serta menyelenggarakan pelayanan kelengkapan dokumen perjalanan wisata (termasuk penyelenggaraan ibadah agama).

V. Usaha jasa adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa dengan tujuan untuk dijual, baik seluruhnya atau sebagian, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha.

Perusahaan jasa adalah suatu satuan unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan jasa, terletak di suatu bangunan dan lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. Perusahaan jasa yang dicakup meliputi: usaha real estat, usaha persewaan, jasa komputer, dan jasa perusahaan lainnya.

Real estat adalah kegiatan pembelian, penjualan, persewaan, pengoperasian, pengelolaan, dan penaksiran bangunan, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindahkan. Kegiatan real estat dapat dilakukan terhadap properti milik sendiri maupun yang disewa, dan juga dapat dikerjakan atas dasar balas jasa maupun kontrak.

Usaha jasa persewaan adalah kegiatan penyediaan berbagai macam barang berwujud, seperti alat transportasi, mesin pertanian dan peralatannya, mesin konstruksi dan teknik sipil serta peralatannya, mesin kantor dan peralatannya, mesin industri lainnya, dan persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi kepada konsumen untuk suatu jangka waktu pembayaran sewa.

Kegiatan jasa persewaan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu persewaan alat-alat transportasi (KBLI: 711), persewaan mesin lainnya dan peralatannya (KBLI: 712), serta persewaan barang-barang keperluan rumahtangga dan pribadi (KBLI: 713).

Kegiatan jasa komputer meliputi jasa konsultasi piranti keras, jasa konsultasi piranti lunak, pengolahan data, jasa kegiatan data base, perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi dan komputer, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer.

Jasa perusahaan adalah kegiatan penyediaan jasa yang pada umumnya melayani perusahaan, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga melayani perorangan.

Kegiatan jasa perusahaan mencakup jasa penelitian dan pengembangan, jasa hukum dan notaris, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa teknik dan arsitektur, jasa periklanan, jasa riset, dan jasa perusahaan lainnya.

VI. Jasa pendidikan adalah kegiatan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan bagi masyarakat, seperti: pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan lainnya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Termasuk juga jasa pendidikan keterampilan.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

VII. Jasa kesehatan adalah kegiatan layanan kesehatan bagi manusia maupun hewan piaraan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti: rumah sakit, poliklinik, praktek dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, paramedis, dukun, sinthe, dokter hewan, dan sebagainya. Termasuk juga kegiatan layanan penunjang kesehatan, seperti: laboratorium, bank mata, bank darah, dan sebagainya.

Jasa kegiatan sosial adalah kegiatan layanan sosial yang dilakukan di dalam atau di luar panti, baik oleh pemerintah maupun swasta untuk memberi bantuan sosial bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang mempunyai keterbatasan/ketidakmampuan untuk menjaga diri, seperti: panti wreda, panti asuhan, panti rehabilitasi, pembinaan masyarakat terasing, pembinaan mental, dan sebagainya.

VIII. Kategori jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya yang dicakup dalam kuesioner ini terdiri dari: jasa kebersihan, organisasi bisnis dan pengusaha, organisasi profesi, jasa binatu, pemangkas rambut, salon kecantikan/rias pengantin, jasa pemakaman, pemeliharaan dan reparasi mobil, pemeliharaan dan reparasi motor, reparasi barang-barang pribadi, reparasi barang-barang keperluan rumahtangga dan reparasi lainnya, jasa penjahitan, dan jasa penyaluran tenaga kerja.

<https://ntt.bps.go.id>

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan, terdiri dari 4 Pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata yang biasanya disebut FLOBAMORATA, terletak antara 8^o - 12^o Lintang Selatan dan 118^o - 125^o Bujur Timur dengan luas daratan 47.349,9 km², dan luas perairan kurang lebih 200.000 km. Secara administrasi NTT terdiri dari 19 Kabupaten dan 1 Kota, 242 Kecamatan, 299 Kelurahan dan 2.643 Desa, ribuan pulau yang dihuni oleh beraneka suku, agama dan adat istiadat. Pada tahun 2007, jumlah penduduk NTT sebanyak 4.448.873 jiwa, terdiri dari laki-laki : 2.234.452 jiwa, dan perempuan : 2.214.421 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun dan kepadatan penduduk : 92 Jiwa per km².

Gambaran perekonomian wilayah NTT yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Guna memperoleh gambaran berbagai kegiatan ekonomi mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan, pada tahun 2006, sensus ekonomi kembali diselenggarakan setelah tahun 1986 dan 1996. Sensus Ekonomi 2006 (SE06) adalah salah satu sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun dengan tahun yang berakhir enam. Sensus Ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar yang lengkap, rinci dan *up to date* tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah, karakteristik usaha, dan kegiatan dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai lapangan usaha, di luar usaha pertanian. Arti dan peranan SE06 sangat penting dalam mengidentifikasi populasi perusahaan/usaha, memperbaharui direktori perusahaan/usaha, serta mengetahui peta penyebaran perusahaan/usaha menurut provinsi, terutama setelah puncak krisis ekonomi 1998.

Pelaksanaan SE06 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran (*listing*) seluruh kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2006. Tahap kedua adalah pendataan struktur biaya, struktur ketenagakerjaan dan informasi lain pada perusahaan/usaha yang dilakukan pada tahun 2007. Pendataan dilakukan secara sampel pada perusahaan/usaha yang berskala mikro dan kecil serta secara sensus pada perusahaan/usaha yang

berskala menengah dan besar. Pendaftaran perusahaan/usaha dilakukan dengan pendekatan usaha (*establishment approach*), mulai dari perusahaan yang berskala besar hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Dari hasil pendaftaran perusahaan/usaha diperoleh sebaran dari perusahaan/usaha dan tenaga kerja menurut kabupaten/kota, kategori lapangan usaha, status badan hukum/usaha, skala usaha dan sebagainya.

Gambaran secara komprehensif tentang hasil pendataan perusahaan/usaha (SE06-SS) sangat dibutuhkan bagi semua pihak. Bagi para pembuat kebijakan informasi SE06-SS yang dihasilkan dapat berguna untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Sementara bagi kalangan usaha, dapat menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar, dan potensi pasar.

Pemerintah saat ini menetapkan tiga pilar pembangunan yang disebut *triple track strategy* yaitu peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan mengetahui gambaran ketenagakerjaan dan perusahaan/usaha suatu wilayah yang dihasilkan dari kegiatan analisis ini dapat digunakan untuk merencanakan jenis pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang tersedia .

1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan Analisis Sensus Ekonomi 2006 Mengenai Ketenagakerjaan di Provinsi NTT adalah untuk :

- Mengetahui profil usaha di NTT yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara mikro
- Memberikan gambaran tentang kegiatan perusahaan/usaha menurut skala usaha yang rinci dan mutakhir menurut kategori lapangan usaha (tidak termasuk kategori lapangan usaha pertanian) pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi
- Memberikan gambaran berbagai kegiatan ekonomi menurut sektor, skala dan wilayah usaha
- Mendapatkan profil dari setiap jenis kegiatan usaha.
- Mendapatkan struktur pengeluaran dan pendapatan dari kegiatan perusahaan/usaha .
- Mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala perusahaan/usaha.
- Mendapatkan kerangka untuk kegiatan survei mendatang.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan, serta untuk melihat potensi usaha-usaha yang ada baik secara sektoral maupun secara spasial.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan analisis SE06 mengenai ketenagakerjaan di provinsi NTT ini adalah :

- Buku pedoman dan publikasi SE06-SS
- Buku pedoman dan publikasi Sakernas
- Data SE06-SS
- Data Sakernas tahun 2006 - 2008
- Data Susenas tahun 2006 - 2007
- Data PDRB
- NTT dalam Angka 2007 - 2008

1.4. Sistematika Penulisan

Analisis SE06 mengenai ketenagakerjaan di Provinsi NTT hasil SE06-SS disajikan dalam 5 (lima) bab. Uraian tentang latar belakang, tujuan dan sumber data disajikan dalam Bab I Pendahuluan. Kemudian dipaparkan mengenai tinjauan profil pekerja Perusahaan/Usaha dilihat dari informasi ketenagakerjaan SE06-SS yang disajikan pada Bab II Profil Pekerja.

Gambaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial pekerja ditinjau dari produktivitas, tingkat efisiensi, dan pendapatan pekerja, serta kondisi sosial rumah tangga pekerja disajikan dalam Bab III Kondisi ekonomi dan sosial pekerja. Bab IV menampilkan gambaran Perkembangan Ketenagakerjaan di NTT, memaparkan tentang konsep tenagakerjaan, karakteristik penduduk bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya pembahasan mengenai konsep ketenagakerjaan, karakteristik penduduk bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) disajikan pada Bab IV Perkembangan Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja sebagai judul dari Bab V menguraikan tentang ukuran pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi sektoral dan penyerapan tenaga kerja sektoral. Akhirnya Bab VI Penutup, menguraikan kesimpulan atas penulisan analisis ini.

PROFIL PEKERJA

2

<https://ntt.bps.go.id>

BAB II

PROFIL PEKERJA

2.1. Informasi Ketenagakerjaan dari SE06-SS

Tahun 2007 BPS melaksanakan tahapan terakhir dari kegiatan Sensus Ekonomi 2006 yaitu pendataan sensus sampel (SE06-SS) perusahaan/usaha mikro dan kecil (UMK) dan perusahaan/usaha menengah dan besar (UMB). Informasi yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut salah satunya tentang ketenagakerjaan yang dirinci berdasarkan skala usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha menengah dan besar (UMB), kategori usaha dan kabupaten/kota. Informasi yang dirinci menurut kabupaten/kota meragakan penyebaran usaha di Nusa Tenggara Timur. Sesuai cakupan Sensus ekonomi 2006 yaitu untuk semua sektor kecuali pertanian, maka informasi ketegakerjaan juga dapat diperoleh untuk masing-masing lapangan usaha (selain sektor pertanian).

Tabel 2.1
Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Kategori
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006

KATEGORI	Banyaknya Usaha		
	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertambangan dan Penggalian	6 081	1	6 082
2. Industri Pengolahan	70 026	58	70 084
3. Listrik, Gas dan Air minum	354	21	375
4. Konstruksi	4 716	164	4 880
5. Perdagangan Besar dan Eceran	135 542	242	135 784
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	4 696	270	4 966
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	33 909	100	34 009
8. Perantara Keuangan	1 512	114	1 626
9. Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12 486	191	12 677
10. Jasa Pendidikan	5 925	70	5 995
11. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2 310	68	2 378
12. Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perorangan	7 273	13	7 286
13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	388	0	388
NTT	285 218	1 312	286 530

Pada tahun 2006 berdasarkan hasil Sensus Ekonomi terdapat 285.218 perusahaan/usaha mikro dan kecil, sedangkan perusahaan/usaha menengah dan besar ada sebanyak 1.312 buah. Untuk perusahaan/usaha mikro dan kecil yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat NTT adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sedangkan kelompok Perusahaan/usaha yang paling banyak adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum. Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Kelompok Usaha dan Kategori Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 seperti terlihat pada table 2.1. Jumlah keseluruhan usaha ekonomi di NTT sebanyak 286.530 usaha, sebagian besar (99,55 persen) berupa UMK dan 0,45 persen lainnya termasuk UMB.

Tabel 2.2
Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Kabupaten/Kota
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006

KABUPATEN/KOTA	Banyaknya Usaha		
	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sumba Barat	28.026	69	28.095
2. Sumba Timur	12.603	65	12.668
3. Kupang	17.238	20	17.258
4. Timor Tengah Selatan	19.607	33	19.640
5. Timor Tengah Utara	11.049	94	11.143
6. Belu	29.877	87	29.964
7. Alor	11.928	30	11.958
8. Lembata	6.158	36	6.194
9. Flores Timur	17.285	86	17.371
10. Sikka	19.602	113	19.715
11. Ende	29.694	85	29.779
12. Ngada	16.724	76	16.800
13. Manggarai	22.358	78	22.436
14. Rote Ndao	5.840	19	5.859
15. Manggarai Barat	8.370	41	8.411
71. Kota Kupang	28.859	380	29.239
NTT	285.218	1.312	286.530

Sementara itu dilihat dari penyebarannya, terlihat bahwa UMK paling banyak terdapat di kabupaten Belu yaitu sebanyak 29.877 usaha, diikuti Kota Kupang (28.859 usaha) dan kabupaten Sumba Barat (28.026 usaha), dan paling sedikit di kabupaten Rote Ndao (5.840 usaha). Lain halnya dengan UMB, terbanyak terdapat di Kota Kupang, diikuti kabupaten Sikka dan kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebaran usaha/perusahaan menurut pulau menunjukkan bahwa konsentrasi UMK paling tinggi terdapat di pulau Flores (42,14 persen), hal ini sejalan dengan luasnya wilayah tersebut yang meliputi tujuh kabupaten, diikuti pulau Timor (39,43 persen), pulau Sumba dan pulau Alor masing-masing 14.24 persen dan 4.18 persen. Sedangkan sebaran usaha/perusahaan menengah dan besar paling tinggi terdapat di pulau Timor (48,26 persen), diikuti pulau Flores (39,12 persen), pulau Sumba (10,30 persen) dan pulau Alor (2,32 persen).

Tabel 2.3
Banyaknya Perusahaan/Usaha menurut Skala Usaha dan Pulau
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006

PULAU	UMK		UMB		JUMLAH
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SUMBA	40.629	14,24	134	10,30	40.763
TIMOR	112.470	39,43	633	48,26	113.103
ALOR	11.928	4,18	30	2,32	11.958
FLORES	120.191	42,14	515	39,12	120.706
NTT	285.218	100,00	1.312	100,00	286.530

2.2. Profil Pekerja Perusahaan/Usaha

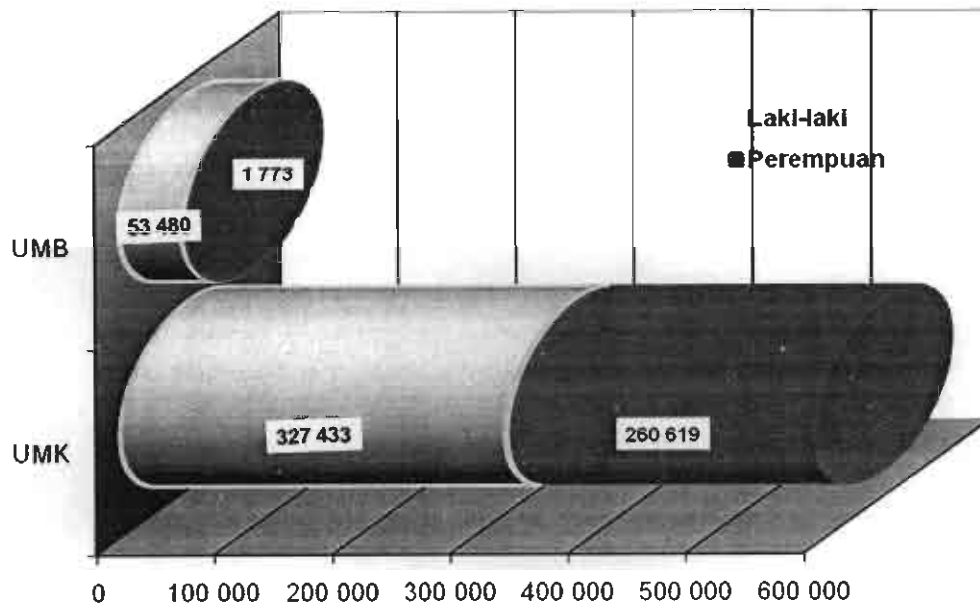
Selaras dengan jumlah usaha/perusahaan, penyerapan tenaga kerja terbesar di NTT hasil sensus ekonomi 2006 juga terdapat pada kelompok perusahaan/usaha mikro dan kecil yakni sebanyak 588.052 orang (91,41 persen), dimana daya serap tertinggi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, sedang pada kelompok perusahaan/usaha menengah dan besar menyerap tenaga kerja sebanyak 55.253 orang (8,59 persen).

Tabel 2.4
Banyaknya Tenaga Kerja menurut Skala Usaha dan Kategori
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006

KATEGORI (1)	Jumlah Tenaga Kerja		
	UMK (2)	UMB (3)	Jumlah (4)
1. Pertambangan dan Penggalian	12 334	13	12 347
2. Industri Pengolahan	133 779	2 692	136 471
3. Listrik, Gas dan Air minum	666	851	1 517
4. Konstruksi	24 897	1 290	26 187
5. Perdagangan Besar dan Eceran	234 547	3 234	237 781
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	11 922	2 313	14 235
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	47 751	951	48 702
8. Perantara Keuangan	7 571	34 511	42 082
9. Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan	20 396	1 666	22 062
10. Jasa Pendidikan	69 225	2 882	72 107
11. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10 123	4 635	14 758
12. Jasa Kemasyarakatan, SosBud, Hiburan & Perorangan	14 250	215	14 465
13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	591	0	591
NTT	588 052	55 253	643 305

Sementara itu dilihat menurut jenis kelamin pekerja, diketahui bahwa jumlah pekerja hasil pendataan Sensus Ekonomi 2006 yang bekerja di kelompok UMK sebanyak 588.052 orang terdiri dari 327.433 laki-laki (55,68 persen) dan 260.619 perempuan (44,32 persen), sedang jumlah pekerja di kelompok UMB sebanyak 55.253 orang terdiri dari 53.480 laki-laki (96,79 persen) dan 1.773 perempuan (3,21 persen). Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan pekerja perempuan, pada kelompok UMB pekerja laki-laki sangat dominan (96,79 persen) dibandingkan kelompok UMK yang hanya sekitar (55,68 persen). Secara rinci proporsi jumlah pekerja menurut jenis kelamin dan skala usaha seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Jumlah Tenaga kerja Menurut kelompok Usaha dan Jenis Kelamin
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006



Tabel 2.5
Banyaknya Tenaga Kerja Dibayar dan Tidak Dibayar menurut Skala Usaha
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006

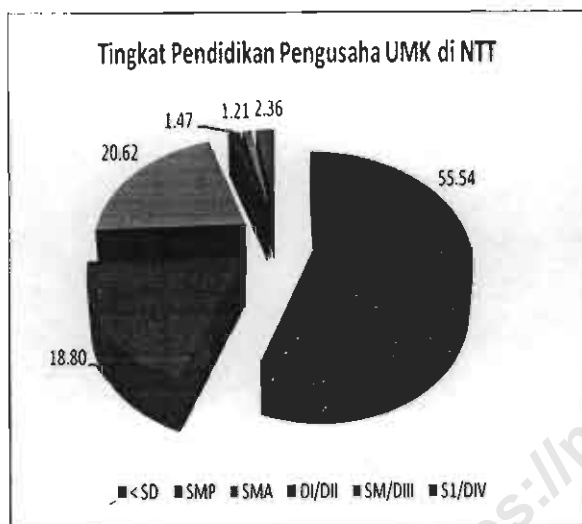
Skala Usaha	Tenaga Kerja					
	Dibayar		Tidak dibayar		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. UMK	163.165	27,75	424.887	72,25	588.052	100,00
2. UMB	54.280	98,24	973	1,76	55.253	100,00
NTT	217.445	33,80	425.860	66,20	643.305	100,00

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar (72,25 persen) pekerja usaha skala mikro kecil merupakan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, sedang pekerja usaha menengah besar hampir seluruhnya (98,27 persen) merupakan pekerja dibayar. Rendahnya rasio pekerja tidak dibayar inilah yang merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas usaha mikro

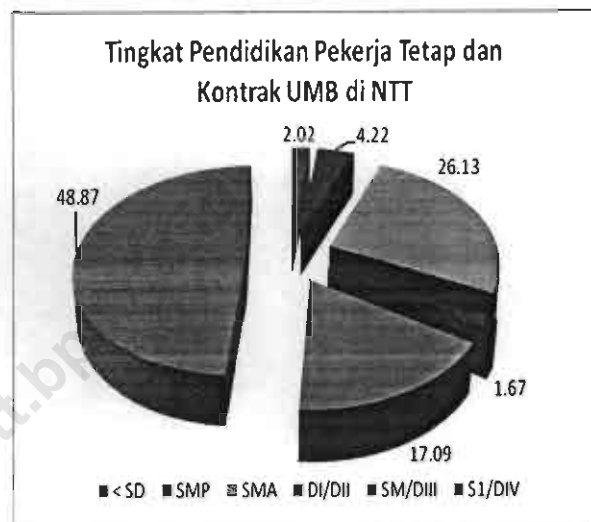
kecil. Jika kenyataan ini dihubungkan dengan pekerja menurut jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar adalah perempuan.

Selain status pekerja, tingkat produktivitas juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pekerja/pengusaha. Hasil SE'06 menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha mikro dan kecil berpendidikan SD kebawah (55,55 persen) dan hanya 5,03 persen berpendidikan lebih dari SLTA. Sementara itu untuk usaha menengah dan besar sebanyak 47,02 persen pekerja tetap dan kontrak berpendidikan D IV atau S1 dan hanya 2,02 persen berpendidikan SD kebawah. Secara rinci tingkat pendidikan pengusaha UMK dan tingkat pendidikan pekerja tetap dan kontrak UMB seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2a



Gambar 2.2b



**KONDISI EKONOMI dan
SOSIAL PEKERJA**

3

<https://ntt.bps.go.id>

BAB III

KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL PEKERJA

3.1. Produktivitas Pekerja

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang hanya didorong oleh akumulasi investasi bukanlah merupakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Terlebih jika modal diperoleh dengan pinjaman luar negeri dan dipakainya tidak efisien. Demikian pula jika pertumbuhan output hanya didorong oleh pemakaian tenaga kerja yang lebih banyak berarti tingkat kehidupan pekerja tidak berubah, karena tingkat upah dan gaji tidak meningkat. Jika pertumbuhan output diakibatkan hanya karena pertumbuhan input (modal dan tenaga kerja) berarti produktivitas tidak meningkat. Pertumbuhan output yang sama dengan pertumbuhan modal dan tenaga kerja berarti tidak terdapat sisa output yang bebas dan bisa dibagikan untuk peningkatan pendapatan tenaga kerja dan atau peningkatan *return to capital*. Berarti pendapatan tenaga kerja tidak bisa meningkat sehingga tidak ada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, walaupun kesejahteraan penduduk secara keseluruhan bisa meningkat karena lebih banyak tenaga kerja yang bisa terserap oleh pasar kerja. Demikian pula ini berarti pertumbuhan output hanya cukup untuk membayar *return to capital*. Tidak ada sisa yang dapat digunakan untuk investasi pada tahun berikutnya.

Produktivitas merupakan salah satu kata kunci yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja suatu aktivitas ekonomi. Pada tataran mikro kinerja suatu unit produksi tergambar dari produktivitas unit usaha bersangkutan, sedangkan pada tataran makro kinerja aktivitas pembangunan ekonomi dapat dilihat dari nilai produktivitas kumulatif ragaan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah maupun yang diragakan oleh warga wilayah tersebut.

Produktivitas pada dasarnya menggambarkan hubungan antara output dan input dalam sebuah proses produksi atau produktivitas didefinisikan sebagai ratio dari pada nilai output/pendapatan dengan nilai input yang digunakan. Produktivitas dapat diukur secara parsial maupun secara total. Produktivitas parsial menggambarkan suatu hubungan antara output dengan satu input (contoh nya seperti: produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan rata-rata output per tenaga kerja, atau produktivitas modal yang menggambarkan rata-rata output per modal). Produktivitas total atau yang biasa disebut Total Faktor Produktivitas (TFP),

menggambarkan suatu hubungan antara output dengan beberapa input secara serentak (hubungan ini dinyatakan dalam ratio dari indeks output terhadap indeks input agregat).

Dari kedua cara penghitungan di atas, penghitungan produktivitas parsial yang paling sering dipakai dalam berbagai analisis karena cara penghitungannya lebih mudah. Sekalipun demikian jika tidak hati-hati maka interpretasi produktivitas parsial bisa menyesatkan karena dalam penghitungannya hanya menggunakan satu input dan tidak memperhitungkan input lain dalam suatu proses produksi. Dilain pihak pengukuran TFP walau lebih sulit dilakukan namun secara teoritis hasilnya lebih baik karena memperhitungkan elastisitas substitusi antar input.

Tabel 3.1.
Pendapatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 Menurut Kategori Usaha

(Ribuan rupiah)

Kategori Usaha		Pendapatan	Pendapatan/ Usaha	Pendapatan/TK
(1)		(2)	(3)	(4)
C	Pertambangan dan Penggalian	81.057.901	13.330	6.572
D	Industri Pengolahan	1.205.823.881	17.220	9.014
E	Listrik, Gas, Air Minum	12.449.633	35.168	18.693
F	Konstruksi	465.064.154	98.614	18.680
G	Perdagangan	7.802.192.371	57.563	33.265
H	Akomodasi, Restoran, R Makan	310.551.652	66.131	26.049
I	Transportasi, Komunikasi	1.137.568.130	33.548	23.823
	Angkutan	1.062.710.477	32.143	23.192
	Komunikasi	74.857.653	88.380	38.827
J	Perantara Keuangan	50.429.830	33.353	6.661
K	R.Estate, Persewaan & Jasa Persh	316.659.057	25.361	15.526
M	Jasa Pendidikan	712.809.786	120.305	10.297
N	Jasa Kesehantaran	361.717.490	156.588	35.732
O	Jasa Kemasyarakatan	233.206.550	32.065	16.365
P	Jasa Perorangan	5.863.438	15.112	9.921
Nusa Tenggara Timur		12.695.393.873	44.511	21.589

Seperti disebutkan pada bab terdahulu, bahwa Hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE'06) menunjukkan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 285.218 unit, dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 588.052 orang, menghasilkan nilai tambah per tahun yang sebesar 12,7 triliun rupiah. Dengan demikian produktivitas per unit Usaha Mikro dan Kecil adalah sebesar 44,5 juta rupiah, sedangkan produktivitas per tenaga kerja sebesar 21,6 juta rupiah (lihat tabel 3.1).

Pencermatan terhadap tabel 3.1. memperlihatkan bahwa terdapat 2 kategori usaha UMK yang mempunyai nilai pendapatan per unit usaha yang relatif besar yakni di atas 100 juta per tahun yakni kategori usaha Jasa Kesehatan dengan pendapatan 156,6 juta/unit/ tahun dan Jasa Pendidikan yang memperoleh pendapatan sebesar 120,3 juta/ unit usaha/ tahun. Dilain pihak terdapat 4 (empat) kategori usaha yang mempunyai pendapatan antara 50 juta sampai dengan 100 juta per unit usaha per tahun yakni kategori usaha Konstruksi, Komunikasi, Penyedia Akomodasi dan Rumah Makan, serta kategori usaha Perdagangan. Kategori usaha lainnya mempunyai pendapatan di bawah 50 juta rupiah, dengan pendapatan terkecil terjadi pada kategori usaha pertambangan dan penggalian yakni hanya sebesar 13,3 juta rupiah/ unit usaha/tahun.

Bila pencermatan dilihat menurut produktivitas pekerja (pendapatan/tenaga kerja) maka dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) kategori usaha yakni mempunyai produktivitas per tenaga kerja yang relatif besar yakni di atas 25 juta rupiah. Empat kategori usaha dimaksud adalah: kategori usaha Komunikasi, Jasa Kesehatan, Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi, Rumah Makan. Sedangkan kategori usaha lainnya mempunyai nilai produktivitas pekerja relatif kecil yakni di bawah 20 juta rupiah, dengan produktivitas terkecil terjadi pada kategori usaha pertambangan dan penggalian yakni sebesar 6,6 juta rupiah.

Sementara itu, bila dilihat menurut wilayah diketahui bahwa produktivitas pekerja paling tinggi terjadi di kota Kupang (Rp. 31,6 juta), diikuti kabupaten Ngada (Rp. 31,4 juta), dan kabupaten imor Tengah Utara (Rp. 29,7 juta), dan terendah di kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 12,0 juta. Ini berarti pekerja yang berusaha pada skala usaha mikro kecil di kota Kupang paling produktif sedang di kabupaten Sumba Barat paling tidak produktif dibandingkan daerah lain dalam wilayah NTT seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Pendapatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Hasil Sensus Ekonomi
Tahun 2006 Menurut Kabupaten/Kota

(Ribuan rupiah)

Kategori Usaha		Pendapatan	Pendapatan/ Usaha	Pendapatan/TK
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Sumba Barat	782.074.143	27.905	12.026
2.	Sumba Timur	585.339.654	46.444	19.052
3.	Kupang	683.481.572	39.650	18.143
4.	Timor Tengah Selatan	797.706.859	40.685	19.974
5.	Timor Tengah Utara	751.878.752	68.049	29.726
6.	Belu	1.238.709.318	41.460	20.020
7.	Alor	445.326.862	37.335	19.481
8.	Lembata	331.274.861	53.796	26.094
9.	Flores Timur	626.880.882	36.267	19.151
10.	Sikka	779.625.689	39.773	19.483
11.	Ende	1.010.177.000	34.020	19.601
12.	Ngada	1.042.108.058	62.312	31.399
13.	Manggarai	988.960.755	44.233	22.442
14.	Rote Ndao	332.051.456	56.858	25.064
15.	Manggarai Barat	416.194.105	49.725	23.662
16.	Kota Kupang	1.883.580.725	65.268	31.613
Nusa Tenggara Timur		12.695.393.874	44.511	21.589

3.2. Tingkat Efisiensi Pekerja

Yang dimaksud efisiensi adalah kemampuan sebuah usaha/perusahaan untuk memproduksi output maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu, atau kemampuan sebuah usaha/perusahaan untuk memproduksi sejumlah output tertentu dengan menggunakan input dengan jumlah minimal. Usaha untuk mengukur tingkat efisiensi sebuah usaha/perusahaan dilakukan melalui dua tahap yaitu pertama, membuat fungsi produksi frontier (kemampuan meningkatkan efisiensi) dari data set yang ada. Fungsi ini merupakan sebuah garis imajiner yang menyatakan output maksimum yang dapat diproduksi oleh input dengan jumlah tertentu, atau jumlah minimum input yang diperlukan untuk memproduksi output dengan jumlah

tertentu. Usaha-usaha yang terletak pada fungsi produksi frontier merupakan usaha-usaha yang efisien dan diberi nilai 1 (satu). Sebaliknya, usaha-usaha yang tidak terletak pada fungsi produksi frontier dianggap usaha-usaha yang tidak efisien, dan diberi nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Tahap kedua, melakukan pengukuran tingkat efisiensi dengan cara mengukur jarak dari posisi setiap usaha ke fungsi produksi frontier. Dengan demikian, pengukuran efisiensi bersifat relatif terhadap seluruh usaha yang dimasukkan dalam sampel dianalisis.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa, ukuran efisiensi didefinisikan sebagai rasio dari potensi input yang berada pada fungsi produksi frontier terhadap input sebenarnya yang dipakai sebuah perusahaan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Nilai efisiensi sama dengan 1 (satu) menunjukkan bahwa perusahaan berada pada *best practise frontier* dan dinyatakan efisien, sedang nilai efisiensi kurang dari satu menunjukkan perusahaan menggunakan inputnya tidak efisien. Hal ini berarti jumlah input yang digunakan bisa diturunkan secara proporsional tanpa adanya perubahan output yang dihasilkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Palangkaraya, A dan Young, J (2006) diketahui bahwa perusahaan yang masih ada (incumbent) selalu paling efisien, sedang di awal periode perusahaan yang baru kurang efisien tetapi menjadi paling efisien di akhir periode.

3.3. Pendapatan Pekerja.

Upah/gaji pada dasarnya merupakan hak dari setiap pekerja untuk mendapat balas jasa atas keterlibatannya dalam proses produksi barang dan jasa. Pada pihak pengusaha pembayaran upah/gaji untuk pekerja merupakan kewajiban perusahaan atas jasa yang diterima dari pekerja. Upah/gaji atau balas jasa yang diterima pekerja dapat berupa uang maupun barang yang dinilai dengan harga yang berlaku. Bagi pekerja (tenaga kerja) gambaran upah/gaji yang diterima merupakan ukuran kesejahteraannya. Semakin tinggi upah/gaji yang diterima maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan pekerja, sebaliknya semakin kecil upah yang diterima maka semakin rendah tingkat kesejahteraannya. Hal ini dapat dipahami karena balas jasa yang diterima oleh pekerja umumnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dapat dilihat dari adanya kebijakan penetapan nilai rupiah minimal yang harus diterima oleh pekerja dari pihak perusahaan. Nilai minimal dimaksud telah diperhitungkan dengan memperhatikan biaya hidup minimal yang memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara standar.

Nilai yang dimaksud ditetapkan menurut wilayah yang dikenal dengan nama Upah Minimal Regional (UMR). Pemerintah Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya menetapkan UMP (upah minimal provinsi) yang dipakai sebagai standar pemberian upah oleh perusahaan yang ada di NTT.

UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 ditetapkan sebesar 650 ribu rupiah. Sebelumnya pada tahun 2007 ditetapkan sebesar sebesar 600 ribu dan 550 ribu rupiah pada tahun 2006. Realitas ini menunjukkan adanya kenaikan UMP di NTT terjadi setiap tahun. Kenaikan ini dapat dipahami karena adanya kenaikan biaya hidup setiap tahunnya sebagai akibat dari adanya kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup yang diikuti dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat.

Tabel 3.3.
Jumlah Upah/Gaji Yang Di Bayarkan Perusahaan, Rata-Rata Upah/Gaji Yang Diterima Tenaga Kerja Yang Dibayar Pada UMK Hasil SE'06 Menurut Kategori Usaha

(Ribuan rupiah)

Kategori Usaha		Total Upah yg di bayar	Upah/TK di bayar/Thn	Upah/TK di bayar/Bln
(1)		(2)	(3)	(4)
C	Pertambangan dan Penggalian	3.934.213	3.259	272
D	Industri Pengolahan	100.623.801	4.702	392
E	Listrik, Gas, Air Minum	1.693.216	8.180	682
F	Konstruksi	38.694.360	2.077	173
G	Perdagangan	139.752.591	6.001	500
H	Akomodasi, Restoran, R Makan	16.962.428	4.312	359
I	Transportasi, Komunikasi	67.607.804	5.626	469
	Angkutan	61.999.759	5.509	459
	Komunikasi	5.608.045	7.340	612
J	Perantara Keuangan	5.901.586	1.456	121
K	R.Estate, Persewaan & Jasa Persh	21.203.651	5.273	439
M	Jasa Pendidikan	474.562.079	7.701	642
N	Jasa Kesehatan	161.568.136	20.910	1.742
O	Jasa Kemasvarakatan	29.658.755	6.086	507
P	Jasa Perorangan	622.632	3.538	295
	Nusa Tenggara Timur	1.062.785.252	6.514	543

Tabel 3.4.
Jumlah Upah/Gaji Yang Di Bayarkan Perusahaan, Rata-Rata Upah/ Gaji Yang Diterima Tenaga Kerja Yang Dibayar Pada UMK Hasil SE'06 Menurut Kabupaten/Kota

(Ribuan rupiah)

Kategori Usaha		Total Upah yg di bayar	Upah/TK di bayar/Thn	Upah/TK di bayar/Bln
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Sumba Barat	77.334.785	4.983	415
2.	Sumba Timur	49.185.583	6.748	562
3.	Kupang	76.103.404	7.442	620
4.	Timor Tengah Selatan	84.859.253	8.320	693
5.	Timor Tengah Utara	53.166.715	5.930	494
6.	Belu	105.628.002	5.966	497
7.	Alor	35.515.551	5.192	433
8.	Lembata	24.726.770	6.107	509
9.	Flores Timur	64.547.030	7.205	600
10.	Sikka	60.246.924	5.445	454
11.	Ende	74.036.913	7.337	611
12.	Ngada	75.616.681	7.894	658
13.	Manggarai	109.087.861	8.726	727
14.	Rote Ndao	27.357.498	6.233	519
15.	Manggarai Barat	30.962.400	5.096	425
16.	Kota Kupang	114.267.038	5.797	483
Nusa Tenggara Timur		1.062.785.253	6.514	543

Membandingkan besaran UMP dan besaran upah yang diterima setiap tenaga kerja usaha mikro kecil di NTT hasil Sensus Ekonomi 2006 setidaknya dapat memperlihatkan realitas tingkat kesejahteraan pekerja di NTT. Dari tabel 3.3 terlihat bahwa rata-rata upah/gaji yang diterima pekerja dibayar UMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur per bulan hanya sebesar 543 ribu rupiah. Angka ini mengindikasikan bahwa upah/gaji yang diterima rata-rata pekerja masih berada di bawah tetapan pemerintah (UMP).

Hal yang diperlihatkan dari pencermatan terhadap tabel 3.3 adalah bahwa terdapat beberapa kategori usaha yang mempunyai rata-rata upah/gaji per bulan per tenaga kerja yang berada di atas nilai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Kategori usaha yang dimaksud adalah kategori usaha Jasa Kesehatan (1.742.000 rupiah), Listrik, Gas, Air Minum (682 ribu rupiah), Jasa Pendidikan (642 ribu rupiah) dan kategori usaha komunikasi sebesar 612 ribu rupiah. Dilain pihak terdapat 3 (tiga) kategori usaha yakni kategori usaha Konstruksi, Pertambangan dan

Penggalian dan Perantara Keuangan yang mempunyai pekerja dengan rata-rata upah yang diterima per bulan di bawah 50 persen UMP. Sekalipun demikian pemaknaan angka-angka ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena pendekatan penghitungan per bulan didekati dengan membagi upah yang diterima per tahun di bagi dengan 12 (jumlah bulan dalam 1 tahun). Dapat dijelaskan bahwa ragaan ekonomi UMK tidak selamanya bersifat kontinyu sepanjang bulan dalam 1 (satu) tahun, tetapi dapat berupa aktivitas ekonomi pada bulan-bulan tertentu saja seperti pada kategori usaha Konstruksi dan Pertambangan dan Penggalian.

Sementara itu, jika upah pekerja di NTT dilihat menurut wilayah terlihat bahwa pekerja di kabupaten Manggarai menerima upah paling tinggi yakni sebesar Rp. 727 ribu per bulan, berikutnya kabupaten Timor Tengah Selatan (Rp. 693 ribu) dan kabupaten Ngada (Rp. 658 ribu). Sedang, pekerja di kabupaten Sumba Barat menerima upah paling rendah yakni sebesar Rp. 415 ribu per bulan, hal ini sejalan dengan rendahnya produktivitas pekerja di daerah ini. Upah terendah berikutnya adalah kabupaten Manggarai Barat (Rp. 425 ribu) dan kabupaten Alor (Rp. 433 ribu).

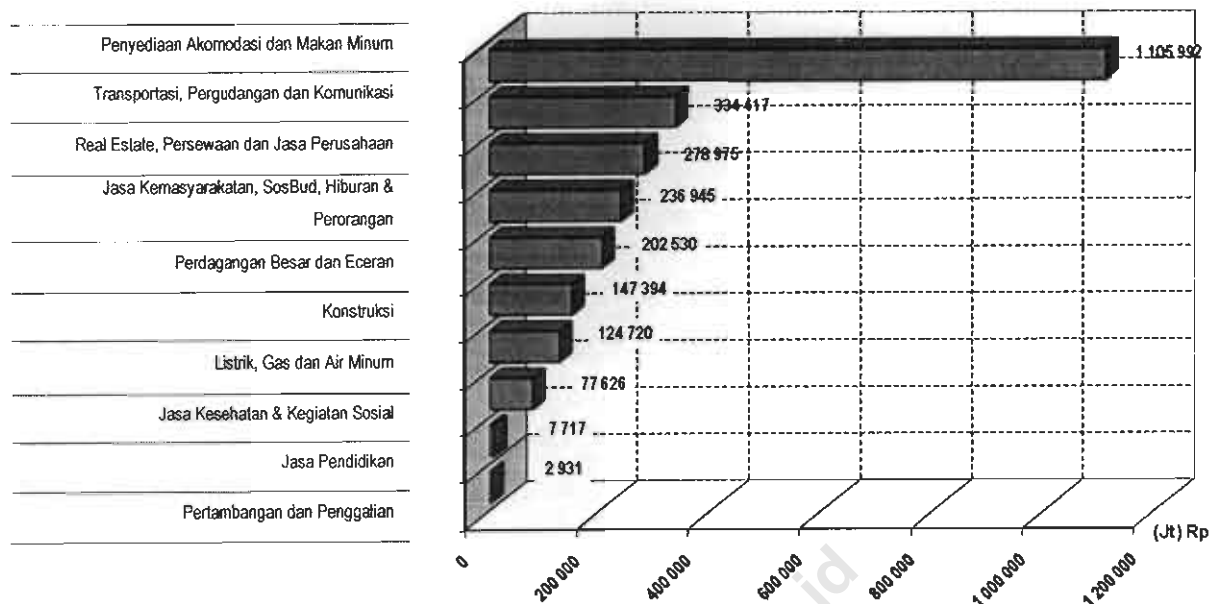
Ditinjau dari jenis skala usaha, terlihat bahwa pekerja di sektor usaha menengah besar menerima upah lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor usaha mikro kecil, yakni masing-masing sebesar Rp. 3,4 juta per bulan dan Rp. 0,5 juta per bulan (Tabel 3.5). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja di sektor UMB lebih tinggi dibandingkan pekerja di sektor UMK. Hasil Sensus Ekonomi tahun 2006 juga menunjukkan bahwa jumlah upah/gaji yang dibayarkan perusahaan mikro kecil kepada para pekerja pada tahun 2006 sebesar Rp. 1,1 triliun rupiah dan perusahaan menengah besar Rp. 2,2 trilyun rupiah.

Tabel 3.5.
Upah/Gaji Yang Di Bayarkan Perusahaan, Rata-Rata Upah/ Gaji Yang Diterima Tenaga Kerja Yang Dibayar Hasil SE'06 Menurut Skala Usaha

(Ribuan rupiah)

Skala Usaha		Total Upah yg di bayar	Jumlah TK di bayar	Upah/TK di bayar/Bln
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	UMK	1.062.785.253	163.165	543
2.	UMB	2.248.492.045	54.280	3.452
Nusa Tenggara Timur		3.311.277.297	217.445	

Gambar 3.1
Besarnya Pendapatan Perusahaan/Usaha Menengah dan Besar
menurut Kategori Lapangan Usaha
Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2006



Bila angka ini dibandingkan dengan besarnya pendapatan yang diterima yakni masing-masing sebesar Rp. 12,7 triliun dan Rp. 2,8 triyun, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dibayarkan kepada pekerja UMK jauh lebih kecil dibandingkan UMB, yakni masing-masing sebesar 8,37 persen dan 79,79 persen dari total pendapatan yang diterima (Tabel 3.6). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UMB memberikan tingkat kesejahteraan pekerja yang lebih baik dibandingkan pekerja kelompok UMK.

Tabel 3.6.
Pendapatan Usaha, Upah/Gaji Yang Di Bayarkan Perusahaan dan Proporsi Upah terhadap
Pendapatan, Hasil SE'06 Menurut Skala Usaha

Skala Usaha		Pendapatan Usaha (Ribu Rp)	Total Upah yg di bayar (Ribu Rp)	Upah/Pendapatan (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	UMK	12.695.393.873	1.062.785.253	8,37
2.	UMB	2.818.107.326	2.248.492.045	79,79
Nusa Tenggara Timur		15.513.501.199	3.311.277.297	

3.4. Kondisi Sosial Rumah Tangga Pekerja

Gambaran tentang tingkat kesejahteraan pekerja disamping dapat dipotret dari realitas upah/gaji yang diterima dapat juga melalui kondisi perumahan (status tempat tinggal) dan juga tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Grafik.3.2

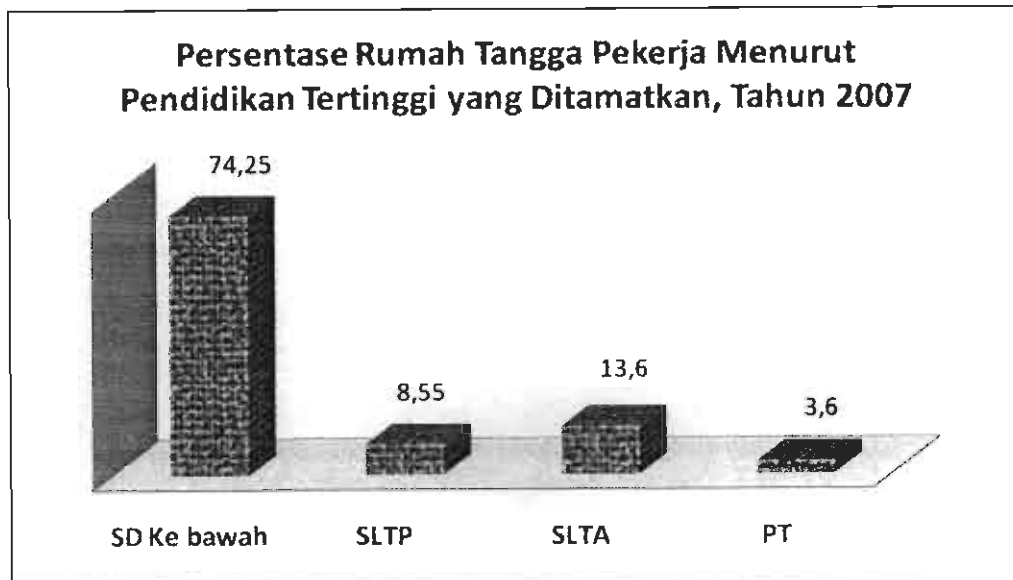


Sumber : Susenas 2007

Status tempat tinggal pekerja setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kemampuan secara ekonomi. Setiap orang tentunya mengharapkan untuk memiliki rumah sendiri sebagai tempat bernaung, namun seringkali realitas ekonomi menjadi kendala untuk merealisasikannya, akibatnya pilihan jatuh pada menyewa ataupun mengontrak rumah. Di lain pihak tingkat pendidikan pekerja umumnya berpengaruh terhadap tingkat upah/gaji yang diterima yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Sehubungan dengan ini maka gambaran kondisi sosial pekerja pada tulisan ini akan dijelaskan menurut 2 (dua) realitas dimaksud.

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa sebagian besar (86,56 %) rumah tangga pekerja bermukim pada tempat tinggal dengan status rumah milik sendiri. Sedangkan hanya sebagian kecil saja yang menyewa (1,49 persen) ataupun mengontrak (1,16 persen). Sedangkan sebanyak 10,79 persennya pada status lainnya (bukan milik sendiri tanpa kontrak dan sewa).

Gambar 3.3



Gambar 3.3. menggambarkan tentang persentase rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga (KRT). Dari grafik tersebut terlihat bahwa umumnya pekerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpendidikan SD ke bawah (termasuk yang pernah sekolah tetapi tidak tamat SD dan yang tidak pernah sekolah sama sekali) yakni mencapai 74,25 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP sebanyak 8,55 persen, berpendidikan SLTA sebanyak 13,60 persen dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana dan Diploma) sebanyak 3,60 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja tentunya akan mengakibatkan rendahnya posisi tawar pekerja dalam menentukan upah yang layak (setidaknya memenuhi tuntutan UMP serta kategori usaha yang diminati) akibatnya terjadi *pengangguran terselubung*. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka pekerja terpaksa harus menerima kenyataan bahwa mereka harus menggeluti bidang usaha yang mungkin tidak diminati, atupun kalau diminati namun tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Sehubungan dengan hal ini maka upaya peningkatan pendapatan pekerja mestinya di arahkan pada: 1) peningkatan pengetahuan/ ketrampilan/ kompetensi pekerja sehingga mampu menjawab tantangan kerja, serta 2). Kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk berpihak pada pekerja melalui berbagai regulasi yang berkeadilan.

**PERKEMBANGAN KETENAGA
KERJAAN DI NTT**

4

BAB IV

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1. Konsep Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dasar kehidupan manusia yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Keputusan individu untuk bekerja tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial seperti tingkat pendidikan, budaya, infrastruktur, lingkungan dan kelembagaan. Pemerintah saat ini telah memasukkan peningkatan kesempatan kerja sebagai salah satu dari *triple track strategy*, disamping pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan yang dilakukan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja.

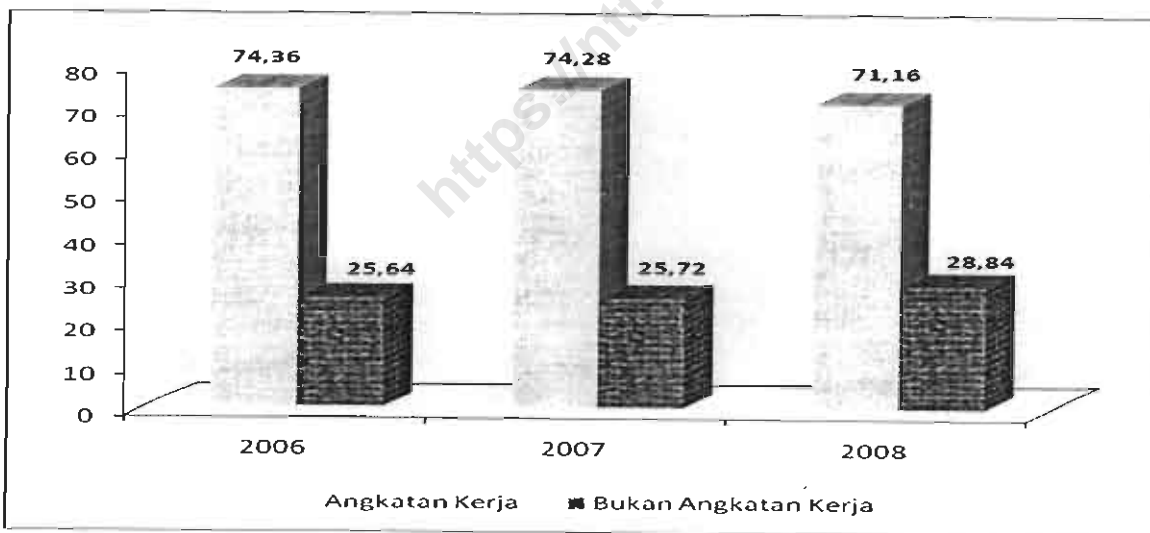
Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan sejak Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1976 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 1976. Sampai saat ini, SAKERNAS mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Pada tahun 1986 sampai dengan 1993 SAKERNAS dilakukan secara triwulanan, pada tahun 1994 sampai dengan 2001 SAKERNAS dilakukan secara tahunan setiap bulan Agustus, dan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilakukan secara triwulanan. SAKERNAS tahunan maupun triwulanan (periode 1986 sampai dengan 1993) dilakukan untuk penyajian data sampai dengan tingkat provinsi, sedangkan SAKERNAS triwulanan dalam periode 2002 sampai dengan 2004 untuk penyajian indikator ketenagakerjaan tingkat nasional atau Indonesia. Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas dan kemutakhirannya serta berdasarkan berbagai pertimbangan, mulai tahun 2005 sampai saat ini SAKERNAS dilaksanakan secara semesteran, yaitu Semester I bulan Februari dan Semester II bulan Agustus. Sejak SAKERNAS Agustus 2007, SAKERNAS dilakukan untuk penyajian indikator sampai dengan tingkat II, sedangkan SAKERNAS Februari hanya menyajikan indikator sampai dengan tingkat provinsi. Untuk maksud keterbandingan antar tahun, perkembangan ketenagakerjaan NTT tahun 2006 – 2008 kali ini dilakukan pada data periode Agustus.

Perkembangan ketenagakerjaan di NTT dilihat dari besarnya penduduk berusia 15 tahun keatas yang terlibat dalam pasar kerja atau disebut Angkatan Kerja. Jumlah Angkatan Kerja pada waktu tertentu merupakan fungsi dari jumlah penduduk. Selain itu juga dipengaruhi dinamika

pembangunan ekonomi yang mempengaruhi sisi permintaan tenaga kerja. Namun sisi penyediaan/penawaran yang ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk dampaknya jauh lebih besar, sehingga perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di NTT seperti halnya daerah lain di Indonesia, lebih dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih).

Angkatan Kerja terdiri dari mereka yang dikategorikan Kelompok Bekerja, termasuk didalamnya yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan Penganggur. Bekerja dimaksudkan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam dan tidak terputus dalam satu minggu lalu. Kegiatan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga, dan yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, mogok, cuti, dan sebagainya juga dimasukkan kedalam Kelompok Bekerja. Sedangkan Penganggur yaitu Angkatan Kerja yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan, termasuk didalamnya mereka yang bersedia untuk bekerja, sedang mempersiapkan usaha, mencari pekerjaan, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 4.1
Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2006-2008 (Persentase)



Disamping Angkatan Kerja, kelompok usia kerja juga terdiri dari Kelompok Bukan Angkatan Kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi produktif, terdiri dari mereka yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan non-produktif lainnya.

Pengukuran didasarkan pada periode hunjukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sebelum tanggal pencacahan. Pada periode 2007-2008 perkembangan Kelompok Bukan Angkatan Kerja meningkat dari 25,72 persen menjadi 28,84 persen sedangkan pada Kelompok Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 74,28 persen menjadi 71,16 persen, seperti pada Gambar 4.1.

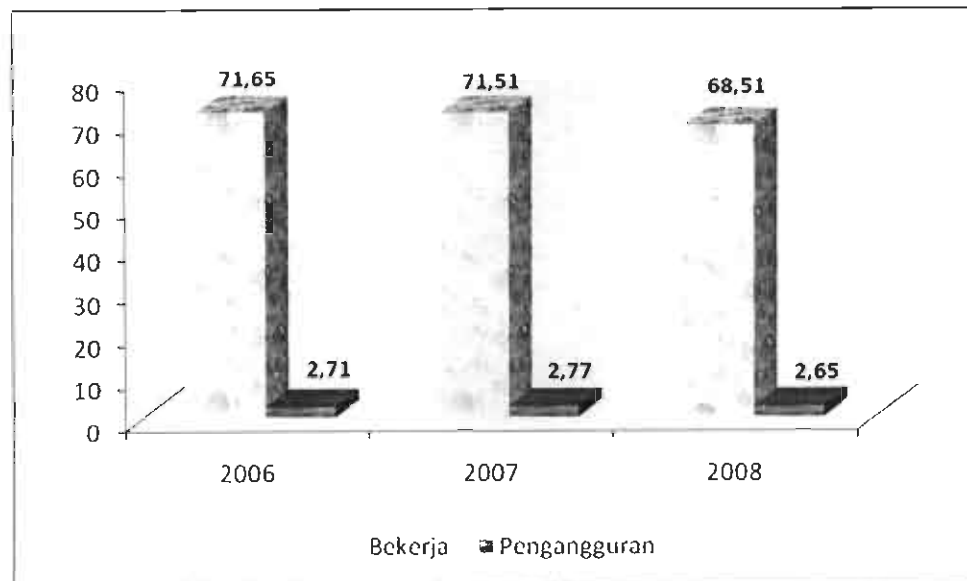
Tabel 4.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Agustus 2006 – 2008 (Persentase)

Kegiatan Utama	Agustus		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angkatan kerja	74,36	74,28	71,16
Bekerja	71,65	71,51	68,51
Penganggur	2,71	2,77	2,65
2. Bukan Angkatan Kerja	25,64	25,72	28,84
Sekolah	7,31	7,80	8,98
Mengurus Rumah tangga	12,80	13,56	14,77
Lainnya	5,53	4,36	5,08

Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas sebanyak 2,8 juta jiwa meningkat menjadi 3,0 juta jiwa pada tahun 2008. Total penduduk berusia 15 tahun keatas pada tahun 2006 terdiri dari 74,36 persen Angkatan Kerja dan 25,64 persen Bukan Angkatan Kerja. Ini menunjukkan pada tahun 2006 setiap 100 penduduk usia kerja yang ada di NTT, 74 diantaranya aktif di pasar kerja dan 26 lainnya pasif karena sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan penduduk bekerja dan penganggur ditunjukkan pada Gambar 4.2. Penduduk bekerja mengalami penurunan pada periode 2006-2008 yaitu dari 71,65 persen pada tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 71,51 persen dan pada tahun 2008 menjadi 68,51 persen. Persentase penganggur meningkat dari 2,71 persen pada tahun 2006 menjadi 2,77 persen, sebaliknya pada tahun 2008 menurun menjadi 2,65 persen.

Gambar 4.2
Perkembangan Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2006-2008 (Persentase)



4.2. Karakteristik Penduduk Bekerja

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan sering digunakan sebagai salah satu ukuran potensi sektor perekonomian untuk menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut juga umum dipakai untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Salah satu teori pembangunan menyebutkan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor sekunder (industri, konstruksi, perdagangan) merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Hal ini disebabkan karena ekspansi output ke sektor modern, khususnya sektor sekunder akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan memungkinkan berlangsungnya perpindahan kelebihan tenaga kerja (*labour surplus*) dari desa ke kota yang berakibat pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian tetap merupakan sektor paling banyak menyerap tenaga kerja sepanjang tahun 2006-2008, diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, industri, perdagangan dan transportasi. Namun struktur ketenagakerjaan bergeser dari sektor primer menuju ke sektor tersier dengan menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan industri, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa kemasyarakatan, sektor perdagangan, sektor transportasi dan sektor keuangan.

Tabel 4.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2006 – 2008 (Persentase)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	Agustus		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
PERTANIAN	74,50	68,53	69,42
INDUSTRI	8,33	8,23	6,75
KONSTRUKSI	2,16	2,49	2,28
PERDAGANGAN	4,74	6,52	6,78
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, KOMUNIKASI	3,11	4,00	4,65
KEUANGAN	0,29	0,36	0,48
JASA KEMASYARAKATAN	6,62	8,89	8,62
LAINNYA	0,23	0,98	1,01
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Selain lapangan pekerjaan utama, struktur ketenagakerjaan dilihat menurut status pekerjaan utama, dikaitkan dengan kebijakan upah khususnya upah minimum. Dalam teori maupun praktek, kebijakan upah minimum merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nasib pekerja dengan status "4" (buruh/karyawan). Akan tetapi disisi lain, dengan asumsi bahwa apabila kebijakan upah minimum ditegakkan secara baik akan menjadi beban bagi kelompok pekerja status "2" dan "3" (pengusaha yang mempekerjakan buruh). Sementara status "5" (pekerja tidak dibayar) praktis tidak terpengaruh sama sekali dengan kebijakan tersebut.

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2008 di NTT sebagian besar pekerja dengan status Bekerja Dibantu Pekerja Tidak Tetap (status "2"), diikuti Pekerja Tak Dibayar (status "5") dan Berusaha Sendiri (status "1") serta Buruh/Karyawan (status "4").

Tabel 4.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2006 - 2008 (Persentase)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	Agustus		
	2006	2007	2008
1	2	3	4
1. Berusaha Sendiri	7,82	14,48	13,67
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	39,87	35,59	36,84
3. Berusaha dibantu buruh tetap	0,72	1,27	1,40
4. Buruh/Karyawan	10,29	12,73	12,59
5. Pekerja Tak Dibayar	40,67	34,62	33,63
6. Pekerja Bebas di Pertanian	0,06	1,19	1,06
7. Pekerja Bebas di Non Pertanian	0,58	0,12	0,81
TOTAL	100,00	100,00	100,00

4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Besaran angkatan kerja di dalam suatu populasi ditentukan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Banyaknya penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dalam perekonomian NTT. Semakin tinggi TPAK semakin tinggi tenaga kerja yang tersedia.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan pola menurun atau dapat dikatakan bahwa tingkat kesempatan kerja di NTT mengalami pertumbuhan negatif selama periode tersebut. TPAK NTT pada tahun 2006 sebesar 74,36 persen; menurun menjadi 74,28 persen pada tahun 2007 dan 71,16 persen pada tahun 2008, sedangkan perkembangan di tingkat kabupaten/kota sangat berfluktuatif (Tabel 4.4).

**Tabel 4.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2006 - 2008
(Dalam Persen)**

KABUPATEN/KOTA	Agustus		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	85,96*)	72,49	73,43
Sumba Timur	80,07	76,42	69,00
Kupang	68,49	77,92	71,93
TTS	69,70	70,62	68,44
TTU	81,08	79,46	75,76
Belu	74,55	70,49	67,21
Alor	68,77	76,39	67,71
Lembata	74,03	72,76	71,70
Flores Timur	68,53	76,00	70,40
Sikka	71,54	67,40	72,44
Ende	78,63	75,55	75,76
Ngada	71,88**)	76,03	69,91
Manggarai	81,41	85,87	79,99
Rote Ndao	72,72	73,38	67,37
Manggarai Barat	77,71	83,12	81,17
Sumba Barat Daya	-	82,22	72,01
Sumba Tengah	-	64,59	67,31
Nagekeo	-	78,35	69,00
Kota Kupang	61,74	54,25	57,67
NTT	74,36	74,28	71,16

Keterangan:

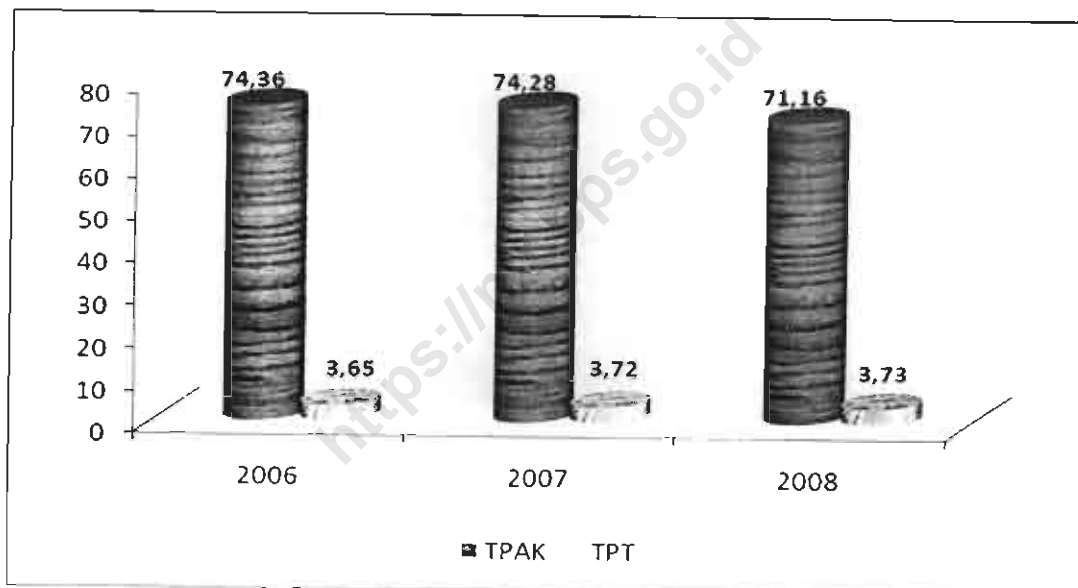
*) Masih tergabung dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah

***) Masih tergabung dengan Kabupaten Nagekeo

4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa pada tahun 2008 tingkat pengangguran di NTT 3,73 persen, dari setiap 100 orang yang aktif di pasar kerja 96 diantaranya bekerja sementara sekitar 4 lainnya merupakan pencari kerja atau penganggur. Angka pengangguran 3,73 persen pada tahun 2008 memang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan angka tahun 2007 (3,72 persen). Akan tetapi peningkatan angka pengangguran yang kecil ini tidak dengan serta merta diinterpretasikan sama baiknya kondisi ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat pengangguran tidak didasarkan "*labour force approach*" yaitu sistem pembayaran upah didasarkan atas perjanjian kerja dan peraturan perburuhan yang ketat, serta tidak tersedianya dana sosial bagi penganggur (*unemployment benefit*), yang menyulitkan untuk membedakan yang bekerja dan penganggur.

Gambar 4.3
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2006-2008 (Persentase)



Di negara berkembang khususnya Indonesia, sebagian kecil saja yang bekerja dengan sistem upah modern. Mayoritas pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga, sedangkan sistem dana sosial bagi penganggur tidak berkembang. Masalah pengangguran didekati dengan konsep "*labour utilization frame work*" yaitu tidak hanya dengan melihat tingkat pengangguran dari sisi pengangguran terbuka tetapi juga tingkat pemanfaatan kurang atau setengah penganggur. Perkembangan TPAC dan TPT selama 2006 sampai dengan 2008 ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Tabel 4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2006 - 2008 (Persentase)

KABUPATEN/KOTA	Agustus		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	2,78*)	4,99	3,82
Sumba Timur	2,49	2,97	2,34
Kupang	5,36	3,72	2,79
TTS	3,02	3,24	3,88
TTU	2,27	2,83	2,99
Belu	3,97	3,13	3,13
Alor	4,33	4,28	2,88
Lembata	3,25	3,10	2,76
Flores Timur	4,73	6,30	4,94
Sikka	2,71	3,41	4,92
Ende	2,88	2,33	3,14
Ngada	1,60**)	2,37	3,98
Manggarai	2,62	1,75	2,49
Rote Ndao	3,89	3,67	5,02
Manggarai Barat	3,79	1,54	2,75
Sumba Barat Daya		1,29	1,59
Sumba Tengah		5,54	2,93
Nagekeo		3,05	3,23
Kota Kupang	10,29	14,14	11,99
NTT	3,65	3,72	3,73

Keterangan:

*) Masih tergabung dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah

***) Masih tergabung dengan Kabupaten Nagekeo

TPT pada tahun 2006 sebesar 3,65 persen; meningkat menjadi 3,72 persen pada tahun 2007 dan 3,73 persen pada tahun 2008. Perkembangan TPT di kabupaten/kota berfluktuatif (Tabel 4.5). Berfluktuasinya Tingkat Pengangguran Terbuka ini dapat dikaitkan dengan masih banyaknya mereka yang dikategorikan Bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau

disebut Setengah Penganggur yaitu sebanyak 997,7 ribu atau sebesar 50,56 persen dari mereka yang bekerja pada tahun 2006; sebanyak 937,6 ribu (46,66 persen) pada tahun 2007 dan 943,7 ribu (45,24 persen) pada tahun 2008.

Kelompok Setengah Penganggur dapat dibagi kedalam Setengah Penganggur Terpaksa (SPT) dan Sukarela (SPS). SPT terdiri dari mereka yang masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain, sedangkan SPS tidak mencari dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain atau disebut pekerja paruh waktu (*part time worker*). Selama tiga tahun terakhir, penduduk kelompok Setengah Penganggur di wilayah ini semakin menurun akibat dari semakin menurun SPT, sedangkan SPS semakin meningkat, sejalan dengan semakin menurunnya TPAK di wilayah ini. Hal ini berarti pasar kerja yang tersedia telah jenuh, maka dari itu harus dilakukan perluasan kesempatan kerja sehingga pasokan tenaga kerja yang cenderung meningkat dapat terserap di pasar kerja.

**Tabel 4.6. Setengah Pengangguran Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas
Agustus 2006 - 2008 (Dalam Ribuan)**

KEGIATAN UTAMA	Agustus		
	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Setengah Pengangguran	997,7	937,6	943,7
Terpaksa	391,9	333,3	366,8
Sukarela	605,8	604,2	576,9

PERTUMBUHAN EKONOMI
dan KESEMPATAN KERJA



<https://ntt.bps.go.id>

BAB V

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

5.1. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai seluruh barang jadi dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam 1 tahun tertentu. Dengan demikian PDRB dapat mencerminkan maju mundurnya perekonomian suatu daerah sehingga wajar kalau pertumbuhan PDRB menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi di tiap daerah. Sementara itu tingkat perekonomian penduduk suatu daerah dapat diketahui dari angka per kapitanya.

Tabel 5.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTT Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2007 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto		
	2005	2006*	2007**
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6.034.394	6.857.125	7.706.388
2. Pertambangan dan Penggalian	219.869	240.490	261.637
3. Industri Pengolahan	266.258	298.129	325.910
4. Listrik, gas dan air bersih	62.545	75.892	84.981
5. Konstruksi	1.118.016	1.247.018	1.350.534
6. Perdagangan, hotel dan restoran	2.368.426	2.720.325	3.045.818
7. Pengangkutan dan Komunikasi	949.685	1.089.535	1.190.578
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan	499.957	564.293	760.080
9. Jasa-jasa	3.291.322	3.811.266	4.411.055
PDRB	14.810.472	16.904.073	19.136.982
PDRB per kapita	3,48	3,88	4,30

Keterangan :

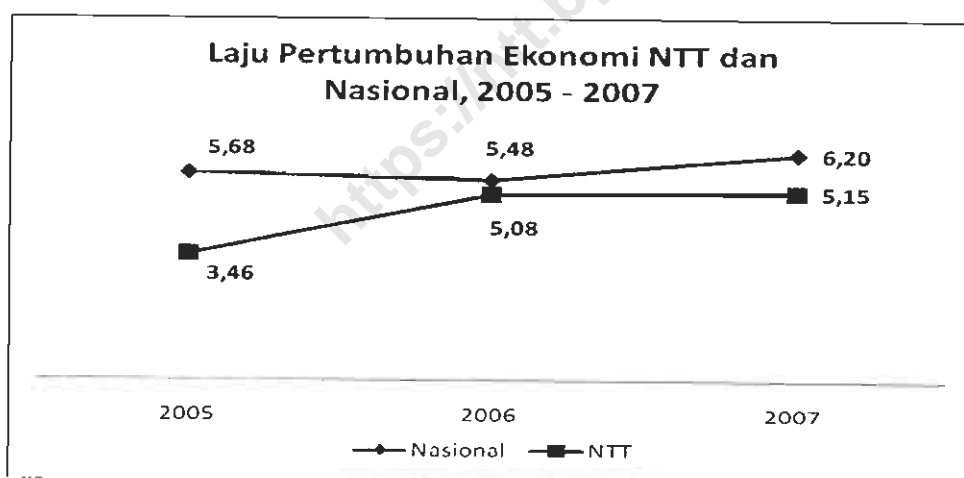
*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Ada tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pendapatan. Dari ketiga pendekatan tersebut, Indonesia hanya menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi, sedang pendekatan pendapatan sampai saat ini belum memungkinkan dilakukan oleh karena keterbatasan ketersediaan data.

PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2005 sebesar Rp. 14,8 trilyun dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp. 19,1 trilyun pada tahun 2007 (Tabel 5.1). Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai sebesar 3,46 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yang mencapai 5,68 persen (seperti terlihat pada gambar 5.1), setahun berikutnya meningkat menjadi 5,08 persen, demikian juga tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi NTT kembali meningkat menjadi 5,15 persen, dimana pada saat Nasional mencapai pertumbuhan sebesar 6,20 persen. Pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi di NTT adalah sektor tersier yang meliputi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (24,35 persen), pengangkutan dan komunikasi (8,11 persen) serta jasa-jasa (6,96 persen). Sektor primer dan sekunder memberikan sumbangan relatif kecil yakni berkisar antara 2,74 – 3,65 persen.

Gambar 5.1.



Sebagaimana diketahui, masalah kesempatan kerja merupakan masalah penting dalam makro ekonomi, karena dari sisi penawaran tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, selain modal dan teknologi. Produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi, dimana semakin produktif tenaga kerja semakin tinggi pula output dan

nilai tambah yang dihasilkan sehingga pada gilirannya secara tidak langsung akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat.

Kesempatan kerja adalah penduduk dengan usia diatas 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang sudah bekerja, baik disektor formal maupun informal. Sektor formal didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki badan usaha yang memiliki tenaga kerja, sedang sektor informal adalah usaha yang dilakukan sendiri atau dibantu orang lain dan atau pekerja bebas, serta pekerja tidak dibayar. Kesempatan kerja di NTT pada periode 2006 - 2007 seperti terlihat pada tabel 5.2. berikut ini :

Tabel 5.2. Kesempatan Kerja Berdasarkan Wilayah, Jenis Kelamin dan Sektor di NTT Tahun 2006 - 2007

Kriteria	2006		2007		Perkembangan 2006-2007	
	Absolut (Ribu Orang)	%	Absolut (Ribu Orang)	%	Absolut (Ribu Orang)	%
1. Kota	249,9	12,67	239,9	11,94	-10,0	-4,00
2. Desa	1.723,3	87,33	1.769,7	88,06	46,4	2,69
Jumlah	1.973,2	100,00	2.009,6	100,00	36,4	
3. Laki-laki	1.089,1	55,19	1.129,2	56,19	40,1	3,68
4. Perempuan	884,1	44,81	880,4	43,81	-3,7	-0,42
Jumlah	1.973,2	100,00	2.009,6	100,00	36,4	
5. Formal	276,2	14,00	327,6	16,30	51,4	18,61
6. Informal	1.696,9	86,00	1.682,1	83,70	-14,8	-0,87
Jumlah	1.973,2	100,00	2.009,6	100,00	36,4	

Sumber : BPS, Sakernas 2007

Pada tahun 2007, kesempatan kerja di kota menurun sebesar 10,0 ribu (-4,00 persen) sementara di desa justru meningkat sebesar 46,4 ribu (2,69 persen). Sedangkan kesempatan kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan sebesar 40,1 ribu (3,68 persen), namun perempuan menurun sebesar 3,7 ribu (-0,42 persen). Penurunan jumlah penduduk yang bekerja di kota menunjukkan semakin ketatnya persaingan mencari kerja di kota akibat dari

meningkatnya jumlah maupun kualitas angkatan kerja, sehingga pencari kerja bergeser ke desa untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang ada. Sementara itu, penurunan kesempatan kerja perempuan merupakan akibat dari beralihnya sebagian pekerja perempuan terutama pekerja sektor informal untuk mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya.

Kesempatan kerja formal jumlahnya meningkat sebesar 51,4 ribu (18,61 persen) dari 276,2 ribu pada tahun 2006, menjadi 327,6 ribu pada tahun 2007, sementara itu kesempatan kerja informal di tahun 2007 justru menurun dari 1.696,9 ribu pada tahun 2006 menjadi 1.682,1 ribu (-0,87 persen) pada tahun 2007. Peningkatan kesempatan kerja penduduk yang bekerja di sektor formal tersebut merupakan gambaran semakin banyaknya pekerja yang terjamin hak-haknya dan semakin meningkatnya perusahaan yang melakukan kegiatan.

Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan laju pertumbuhan ekonomi terhadap laju kesempatan kerja dinyatakan sebagai Elastisitas tenaga kerja (E_{TK}), dimana elastisitas tenaga kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas (usaha padat karya), tetapi jika sebaliknya yang terjadi memberi indikasi perluasan usaha lebih mengarah pada padat modal dan terutama bila didukung oleh angka ICOR yang tinggi.

5.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membantu penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang saat ini berada dalam tingkat pengangguran. Namun kenyataannya, ekonomi yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kerja di pasar kerja.

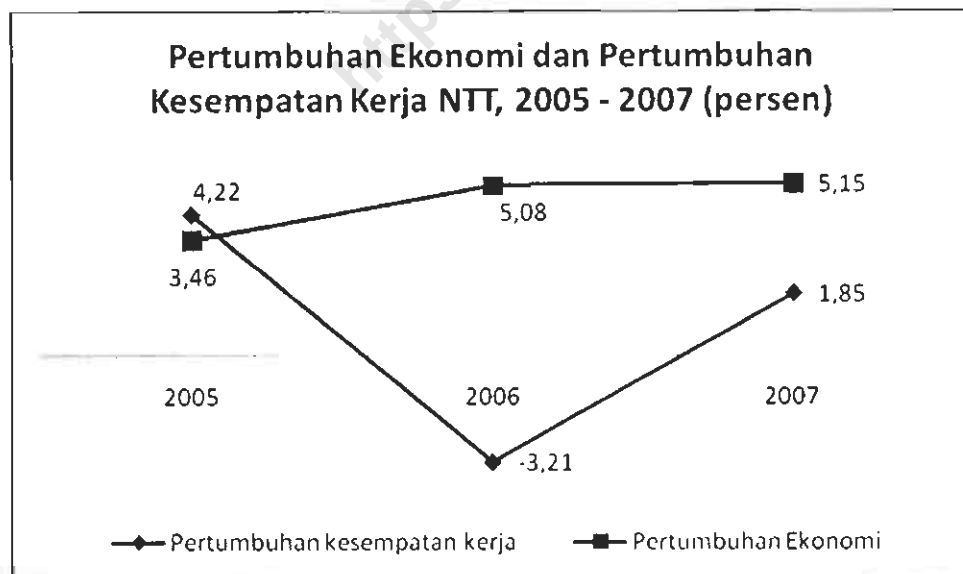
Selama tiga tahun terakhir (2005 – 2007) perkembangan PDRB di NTT terus meningkat, tetapi perkembangan kesempatan kerja berfluktuasi, demikian juga dengan elastisitas kesempatannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Kesempatan Kerja di NTT Tahun 2005 – 2007

Tahun	Perkembangan		Pertumbuhan (persentase)		Elastisitas Tenaga Kerja
	PDRB Adhk (Juta Rupiah)	Kesempatan Kerja (Ribu orang)	PDRB Adhk	Kesempatan Kerja	
2005	330.213	82,6	3,46	4,22	0,25
2006	501.196	- 65,4	5,08	- 3,21	- 0,13
2007	533.900	36,5	5,15	1,85	0,07
Rata-rata	455.103	17,9	4,56	0,95	0,06

Pada tahun 2005 dan 2007, pertumbuhan ekonomi NTT cukup berkualitas karena pertumbuhan ekonominya berdampak meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja, sementara itu pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi NTT kurang berkualitas karena pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tidak berdampak meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini berarti laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan kesempatan kerja, karena nilai tambah yang dihasilkan pada periode tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumsi dari pada investasi. Secara rata-rata, selama periode 2005 - 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen dan kesempatan kerja sebesar 0,95 persen serta elastisitas tenaga kerja sebesar 0,06. Berarti dalam periode tersebut setiap pertumbuhan PDRB 1 (satu) persen mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3,9 ribu orang.

Gambar 5.2.



5.3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan mengikuti suatu hirarki. Hirarki pertama menunjukkan tujuan dari pembangunan. Hirarki kedua menunjukkan sektor-sektor yang terpilih dalam pembangunan, dan hirarki ketiga menunjukkan daerah-daerah yang terpilih. Sementara itu hirarki keempat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk melihat kinerja masing-masing sektor ekonomi perlu dilakukan analisis sektoral. Pembahasan analisis ini dibatasi pada sektor-sektor yang dicakup dalam kegiatan Sensus Ekonomi, kecuali sektor pertanian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Perkembangan PDRB sektoral dan kesempatan kerja sektoral di NTT tahun 2006 dan 2007 ditunjukkan pada table 5.4 dan 5.5. berikut ini.

Tabel 5.4. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor, Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006 – 2007

SEKTOR EKONOMI/ LAPANGAN USAHA	Nilai Tambah Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyard Rp.)		Pertumbuhan Ekonomi (persen)	
	2006	2007	2006	2007
1. Pertanian	4.232,5	4.348,6	4,95	2,74
2. Pertambangan dan Penggalian	137,7	142,7	2,14	3,65
3. Industri Pengolahan	166,1	172,0	4,42	3,54
4. Listrik, Gas dan Air bersih	41,2	42,7	2,04	3,63
5. Bangunan/Konstruksi	683,9	703,7	1,10	2,89
6. Perdag, Hotel dan Restoran	1.694,7	1.779,8	6,16	5,02
7. Pengangkutan dan Komunikasi	719,3	777,6	7,33	8,11
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	314,6	391,3	2,74	24,35
9. Jasa-jasa	2.378,4	2.543,9	5,67	6,96
Produk Domestik Regional Bruto	10.368,5	10.902,4	5,08	5,15

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah tersebut. Kinerja sektor ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan masing-masing sektor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Demikian halnya dengan NTT, pertumbuhan ekonomi NTT tidak terlepas dari masing-masing sektor ekonomi yang membentuknya. Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2006 menunjukkan kinerja positif

cenderung menguat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari table 5.3. terlihat bahwa pada tahun 2005 ekonomi NTT tumbuh sebesar 3,46 persen, sedang pada tahun 2006 meningkat menjadi 5,08 persen. Kemudian pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,15 persen, dan secara umum menunjukkan percepatan kecuali sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dibanding tahun sebelumnya (Tabel 5.4.).

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa perkembangan nilai tambah semua sektor ekonomi di NTT dalam kurun 2006 – 2007 semuanya menunjukkan angka positif, namun tidak demikian dengan kesempatan kerja. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan kesempatan kerja adalah sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi, sedang sektor yang mengalami pengurangan kesempatan kerja adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Perkembangan dan Pertumbuhan Kesempatan Kerja Menurut Sektor, Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2006 – 2007

SEKTOR EKONOMI/ LAPANGAN USAHA	Perkembangan Kesempatan Kerja (orang)		Pertumbuhan Kesempatan Kerja (persen)	
	2006	2007	2006	2007
1. Pertanian	1.392.407	1.377.293	-12,81	-1,09
2. Pertambangan dan Penggalian	10.855	17.587	-49,52	62,02
3. Industri Pengolahan	155.856	165.430	30,18	6,14
4. Listrik, Gas dan Air bersih	2.131	2.033	-0,51	-4,60
5. Bangunan/Konstruksi	33.846	49.955	7,87	47,59
6. Perdag, Hotel dan Restoran	117.806	131.000	30,77	11,20
7. Pengangkutan dan Komunikasi	61.939	80.464	49,04	29,91
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.200	7.223	24,61	-35,51
9. Jasa-jasa	187.147	178.658	48,33	-4,54
Produk Domestik Regional Bruto	1.973.187	2.009.643	-3,21	1,85

Tabel 5.6. Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja Tiap Kenaikan 1 Persen PDRB Menurut Sektor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2007

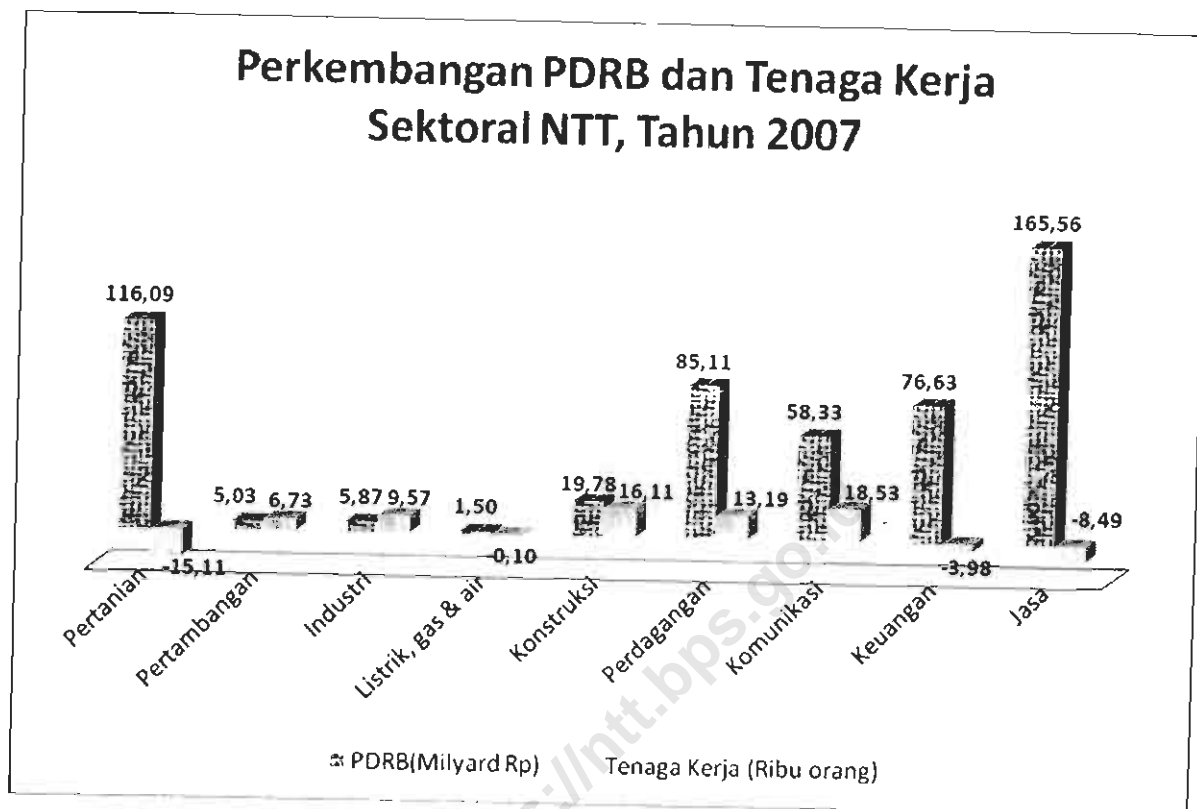
SEKTOR EKONOMI/ LAPANGAN USAHA	Elastisitas Kesempatan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja tiap kenaikan 1 % PDRB
1. Pertanian	- 0,13	5.510
2. Pertambangan dan Penggalian	1,34	1.843
3. Industri Pengolahan	1,63	2.708
4. Listrik, Gas dan Air bersih	- 0,07	27
5. Bangunan/Konstruksi	0,81	5.570
6. Perdag, Hotel dan Restoran	0,16	2.627
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,32	2.284
7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	- 0,05	163
9. Jasa-jasa	- 0,05	1.220
PDRB	0,07	7.080

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan kesempatan kerja positif menghasilkan elastisitas tenaga kerja positif dan sejalan dengan itu maka sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negative juga menghasilkan elastisitas tenaga kerja negative. Elastisitas kesempatan kerja negative diartikan sebagai hubungan antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik, dimana penambahan jumlah tenaga kerja berdampak mengurangi nilai tambah sektor. Dengan kata lain penambahan jumlah tenaga kerja mengakibatkan berkurangnya produktivitas pekerja.

Pada tahun 2007 pertumbuhan PDRB NTT sebesar 5,15 persen (Tahun 5.4) dan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,85 persen (Tabel 5.5), menghasilkan elastisitas kesempatan kerja sebesar 0,07 (Tabel 5.6) berarti bahwa tiap kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen akan tercipta kesempatan kerja sebanyak 7.080 orang. Selanjutnya, jika dianalisa secara sektoral diketahui bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja tiap kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen sebanyak 2.439 orang, sehingga dapat diartikan bahwa sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerja tiap kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen diatas 2.439 orang diidentifikasi sebagai sektor padat karya (*labor intensive*) dan yang kurang dari 2.439 sebagai sektor padat modal (*capital intensive*).

Dari kenyataan tersebut, disimpulkan bahwa sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor perdagangan merupakan sektor padat karya sedang sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa sebagai sektor padat modal.

Gambar 5.3.



PENUTUP

6

<https://ntt.bps.go.id>

BAB VI

PENUTUP

Sensus Ekonomi 2006 (SE06), yang merupakan Sensus Ekonomi ketiga setelah tahun 1986 dan 1996 telah dapat menghasilkan data dasar yang lengkap, rinci dan up to date tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Kegiatan usaha yang dicakup dalam SE06 ini meliputi seluruh kategori lapangan usaha, tidak termasuk kategori lapangan usaha Pertanian (kategori A dan B) dan kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (kategori L).

Berdasarkan hasil pendataan Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS), terdapat 286,5 ribu perusahaan/usaha yang ada di NTT. Distribusi perusahaan/usaha hasil SE06 membedakan skala usaha menjadi dua kategori, masing-masing perusahaan/usaha mikro kecil (UMK) dan perusahaan/usaha menengah dan besar (UMB). Perusahaan/usaha mikro dan kecil sangat mendominasi, yaitu sekitar 285,2 ribu perusahaan/usaha atau sekitar 99,55 persen dari seluruh perusahaan/usaha di NTT. Selebihnya sebanyak 1,3 ribu merupakan perusahaan/usaha berskala menengah dan besar. Perusahaan/usaha mikro dan kecil yang banyak digeluti penduduk NTT adalah sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 47,52 persen dan yang paling sedikit adalah sektor Listrik, gas dan air bersih. Sementara itu perusahaan/usaha menengah dan besar yang banyak digeluti penduduk NTT adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni sebanyak 20,58 persen dan yang paling sedikit adalah sektor Pertambangan dan penggalian. Hasil pendataan SE 2006-SS menunjukkan bahwa dari 16,0 ribu perusahaan/usaha jasa-jasa, sekitar 45,41 persen adalah perusahaan/usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya (Kategori O). Sementara komposisi jumlah perusahaan/usaha jasa-jasa menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha jasa-jasa berskala mikro kecil (91,06 persen), sedangkan yang berskala menengah besar sekitar 0,94 persen.

Bila dilihat dari penyebarannya, perusahaan/usaha di NTT paling banyak terdapat di Pulau Flores dengan jumlah usaha mikro kecil sebanyak 120,2 ribu usaha dan usaha menengah besar sebanyak 0,5 ribu usaha/perusahaan, sedang pulau Timor menempati urutan kedua dengan jumlah usaha sebanyak 112,5 ribu usaha/perusahaan mikro kecil dan 0,6 ribu UMB.

Sejalan dengan keberadaan usaha mikro dan kecil yang mendominasi perekonomian di NTT, komposisi jumlah tenaga kerja pada perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil juga menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja terbanyak, yaitu sekitar 588,1 ribu orang atau mencapai 91,41 persen dari seluruh tenaga kerja di NTT. Selebihnya sebanyak 55,2 ribu (8,59 persen) merupakan tenaga kerja di perusahaan/usaha berskala menengah dan besar. Dari jumlah tenaga yang terserap sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, pada kelompok UMK sebanyak 327.433 orang (55,68 persen) laki-laki dan 260.619 orang (44,32 persen) perempuan sedang kelompok UMB sebanyak 53.480 orang (96,79 persen) laki-laki dan hanya sebanyak 1.773 orang (3,21 persen) sisanya perempuan.

Bila dilihat dari status pekerja memperlihatkan bahwa sebagian besar (72,25 persen) pekerja UMK merupakan pekerja tidak dibayar (bersifat informal) sedang UMB sebagian besar (98,27 persen) pekerja merupakan pekerja dibayar (bersifat formal). Hal ini selaras dengan karakteristik ketenagakerjaan hasil Sakernas yang menyatakan sebagian besar pekerja di NTT bekerja di sektor informal (lihat Tabel 4.3). Status pekerja berkaitan dengan kebijakan upah yang menentukan kondisi ekonomi pekerja. Rendahnya upah pekerja UMK dibandingkan pekerja UMB yakni masing-masing sebesar 543 ribu dan 3,4 juta per bulan merupakan kenyataan dari keterkaitan tersebut. Dengan membandingkan UMP NTT tahun 2006 sebesar 550 ribu per bulan, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata balas jasa pekerja di kelompok UMK lebih kecil dibandingkan UMP sedang balas jasa di kelompok UMB jauh lebih tinggi dibandingkan UMP, dengan demikian kondisi ekonomi pekerja di kelompok UMB lebih baik dibandingkan pekerja di kelompok UMK.

Salah satu penyebab rendahnya balas jasa/upah pekerja adalah rendahnya tingkat pendidikan. Data SE'06 menunjukkan bahwa sebanyak 55,55 persen pengusaha UMK berpendidikan SD kebawah dan hanya 5,03 persen berpendidikan lebih tinggi dari SMA, sementara itu jumlah pekerja di kelompok UMB yang diwakili oleh pekerja tetap dan kontrak hanya 2,02 persen yang berpendidikan SD kebawah, umumnya berpendidikan SMA keatas (47,02 persen). Data SE'06 juga memperlihatkan bahwa pekerja UMK di sektor jasa kesehatan mendapatkan upah balas jasa pekerja paling tinggi yakni sebesar 1,8 juta per bulan, sedang pekerja di sektor Perantara keuangan mendapatkan upah balas jasa pekerja paling rendah.

Bila balas jasa pekerja ini dibandingkan dengan pendapatan usaha terlihat bahwa pekerja UMK memiliki ratio jauh lebih kecil dibandingkan pekerja UMB, yakni masing-masing sebesar 8,37 dan 79,79. Selanjutnya jika dilihat menurut wilayah menunjukkan bahwa pekerja UMK di kabupaten Manggarai mendapatkan balas jasa paling tinggi yakni sebesar 727 ribu per bulan dan kabupaten Sumba Barat yang terendah yaitu sebesar 415 ribu per bulan. Meskipun tingkat pendidikan tenaga kerja di NTT rendah, namun bila ditinjau dari aspek kepemilikan rumah maka dapat dikatakan bahwa kondisi sosial pekerja di NTT cukup mapan.

Perkembangan ketenagakerjaan di NTT selama tiga tahun terakhir kurang menggembirakan karena kenaikan jumlah penduduk usia kerja tidak selalu diikuti dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja karena laju pertumbuhan penduduk Bukan Angkatan Kerja cenderung lebih cepat dibandingkan Angkatan Kerja, dan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang masih rendah seperti ditunjukkan oleh tingginya angka setengah penganggur yang mencapai kisaran antara (46,70 – 50,60) persen. Kondisi kejenuhan ini semakin terasa dengan meningkatnya jumlah Setengah Penganggur Sukarela. Peningkatan kesempatan kerja di desa menunjukkan semakin ketatnya persaingan pasar kerja di Kota, sedang menurunnya kesempatan kerja perempuan dikarenakan makin banyaknya pekerja perempuan yang beralih mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Hal ini berdampak menurunnya pekerja sektor informal, karena pekerja perempuan kebanyakan menekuni pekerjaan informal. Sementara itu struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor pertanian, namun dalam perkembangannya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian dan sektor Industri terus menurun sedang di sektor tersier yang meliputi Jasa Kemasyarakatan, Perdagangan dan Transportasi, serta Keuangan terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir kesempatan kerja di desa meningkat demikian juga pekerja laki-laki di sektor formal

Disamping meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sektor tersier juga berperan sebagai pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Kualitas pertumbuhan ekonomi NTT masih labil, seiring dengan fluktuasi kesempatan kerja. Pada tahun 2005 dan 2007 pertumbuhan ekonomi NTT cukup berkualitas karena mampu meningkatkan kesempatan kerja, sedang pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi NTT kurang berkualitas karena peningkatan nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk konsumsi dari pada investasi sehingga tidak menambah

kesempatan kerja. Namun jika dirata-ratakan, dalam tiga tahun terakhir ini setiap kenaikan PDRB 1 (satu) persen mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3,9 ribu orang.

Pertumbuhan ekonomi semua sektor di NTT terus meningkat, namun tidak demikian dengan kesempatan kerjanya. Sektor usaha yang mengalami penurunan kesempatan kerja adalah sektor Pertanian, sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor Keuangan dan sektor Jasa-jasa sehingga elastisitasnya negatif, sedang sektor lainnya kesempatan kerjanya meningkat dan elastisitasnya positif. Selanjutnya dari angka elastisitas ini diidentifikasi sektor padat karya yang meliputi sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Bangunan, dan Perdagangan. Sedang yang termasuk sektor padat modal meliputi sektor Pertambangan dan Penggalian, Listrik, gas dan air bersih, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa.

<https://ntt.bps.go.id>

· Pertumbuhan ekonomi semua sektor di NTT terus meningkat, namun tidak demikian dengan kesempatan kerjanya. Sektor usaha yang mengalami penurunan kesempatan kerja adalah sektor Pertanian, sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor Keuangan dan sektor Jasa-jasa sehingga elastisitasnya negatif, sedang sektor lainnya kesempatan kerjanya meningkat dan elastisitasnya positif.

Selanjutnya dari angka elastisitas ini diidentifikasi sektor padat karya yang meliputi sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Bangunan, dan Perdagangan. Sedang yang termasuk sektor padat modal meliputi sektor Pertambangan dan Pengalihan, Listrik, gas dan air bersih, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa.

<https://ntt.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- BPS, Analisis Pengangguran Terdidik, Jakarta, 2006
- BPS, Analisis Produktivitas Industri Padat Tenaga Kerja Taun 2001 - 2004, Jakarta, 2006
- BPS, Proceeding Jurnal Ketenagakerjaan, Jakarta, 2007
- BPS, Data Ketenagakerjaan Provinsi NTT 2006, Jakarta, 2007
- BPS, Data Ketenagakerjaan Provinsi NTT 2007, Jakarta, 2008
- BPS Provinsi NTT, Susenas Provinsi NTT 2007, Kupang, 2008
- BPS Provinsi NTT, Pendapatan Regional Provinsi NTT 2007, Kupang, 2008

<https://ntt.bps.go.id>



BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp. : (0380) 822682, Fax : (0380) 833124

Website : <http://ntt.bps.go.id> Email: ntt@bps.go.id